

**SURVEI PELAYANAN DASAR  
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN  
2007**

**Buku 2:  
Laporan Pelaksanaan dalam Gambar**

**SURVEI PELAYANAN DASAR  
KESEHATAN DAN PENDIDIKAN 2007**

**BUKU 2: LAPORAN PELAKSANAAN DALAM GAMBAR**

ISBN

Nomor Publikasi : 04320.05

Katalog BPS :

Ukuran Buku : 21 CM X 29 CM

Jumlah Halaman : 100+ vii

Tim Penyusun : Wynandin Imawan (Koordinator), Hamonangan Ritonga, Uzair Suhaimi,  
M. Sairi Hasbullah Yani Kurniani, Marlina Kamil, Anto Reinette Mangiri,  
Satriono, Nurma Midayanti, Tiodora Hadumaon Siagian, Pudji Ismartini,  
Indra Cahyono, Diah Rismasari, Suhariadi, M. Zulkifli

Penyunting : Arizal Ahnaf

Naskah : Tim SPDKP BPS

Gambar Kulit : Tim SPDKP BPS

Pencetak : CV Rioma

<http://www.bps.go.id>



## Kata Pengantar

Dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi maka salah satu program yang diluncurkan Pemerintah pada tahun 2007 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan umum program ini adalah untuk menyiapkan secara dini sumber daya manusia dengan cara meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan dasar. Untuk jangka pendek, melalui pemberian bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Untuk jangka panjang, melalui persyaratan yang ditentukan, diharapkan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang mengarah pada perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta perbaikan tingkat pendidikan anak-anak RTSM, sehingga secara berangsur rantai kemiskinan dapat diputus. Program ini merupakan program nasional yang dilaksanakan secara bertahap dan dicanangkan berlanjut hingga tahun 2015.

Untuk menentukan RTSM yang memenuhi kriteria PKH, pemerintah menugaskan BPS melakukan pendataan RTSM serta pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pendataan dilakukan secara bertahap melalui Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP). Pada tahun 2007, SPDKP dilaksanakan dalam dua putaran, Putaran 1 untuk mendapatkan sekitar 500.000 RTSM calon penerima PKH tahun 2007 dan Putaran 2 untuk mendapatkan sekitar 700.000 RTSM calon penerima PKH 2008.

Salah satu harapan atau tuntutan dalam pelaksanaan SPDKP adalah agar data yang dihasilkan bebas dari kesalahan. Oleh karena itu, BPS sebagai lembaga yang dipercaya melaksanakan pendataan telah berupaya melakukan pekerjaan ini sebaik-baiknya dengan memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Laporan pelaksanaan SPDKP 2007 diterbitkan dalam 2 (dua) buku, buku pertama memuat penjelasan teknis SPDKP dan buku kedua (buku ini) memuat tahapan pelaksanaan SPDKP dalam gambar. Kedua laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan kegiatan SPDKP, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap evaluasi data. Laporan ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para pelaksana kegiatan pendataan mikro kemiskinan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan SPDKP 2007 tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik di pusat maupun di daerah, khususnya Pemerintah Daerah. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah berperan dalam kegiatan SPDKP disampaikan penghargaan dan terima kasih. Penghargaan khusus diberikan kepada Tim Teknis SPDKP BPS yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran sepenuhnya dari awal kegiatan SPDKP hingga selesainya laporan ini.

Jakarta, 4 Desember 2007  
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan  
NIP. 340003999

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	3
Latar Belakang	3
Sasaran PKH	5
Tujuan	5
Landasan Hukum	7
II. PERENCANAAN	11
Penyusunan Instrumen	11
Uji Coba SPDKP	12
Cakupan Wilayah	16
Cakupan Data	18
Perencanaan Anggaran	19
Koordinasi BPS Pusat dengan Daerah	20
Koordinasi BPS Provinsi dengan BPS Kabupaten/Kota	24
III. PELATIHAN	33
Workshop Instruktur Utama	33
Pelatihan Instruktur Nasional	34

	Halaman
Pelatihan Petugas Pengolahan Data	39
<b>IV. PENDATAAN</b>	<b>43</b>
Organisasi Lapangan	44
Pendataan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Dasar	45
Pendataan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)	49
Pengawasan	58
<b>V. PENGOLAHAN</b>	<b>65</b>
Sistem Ban Berjalan	65
Verifikasi Hasil Pengolahan	69
Kompilasi Data	70
<b>VI. EVALUASI</b>	<b>77</b>
Rapat Pembinaan Pelaksana SPDKP	77
Rapat Evaluasi Kegiatan SPDKP	80
<b>VII. PENUTUP</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Daftar SPDKP07. LS (Putaran 2)	89
Lampiran 2 Daftar SPDKP07. SW (Putaran 2)	90
Lampiran 3 Kuesioner SPDKP07. RT (Putaran 2)	91

	Halaman
Lampiran 4 Daftar SPDKP07. VRT	98
Lampiran 5 Daftar SPDKP07. VLD	99
Lampiran 6 Daftar SPDKP07. VLK	100



# BAB 1

# PENDAHULUAN 1

## Latar Belakang

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam proses mewujudkan kesejahteraan rakyat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2007 menunjukkan penduduk miskin di Indonesia sebanyak 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari jumlah penduduk. Untuk membantu kehidupan penduduk miskin pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti Raskin serta Askeskin. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat yang bersifat penguatan rumah tangga miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) telah mulai diimplementasikan pada tahun Anggaran 2007.



Kepala BPS, Dr. Rusman Heriawan menjelaskan Peranan BPS dalam Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Rapat Koordinasi SPDGP di Surabaya

Program Keluarga harapan (PKH) adalah program penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dini dengan cara pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk jangka pendek, program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Untuk jangka panjang, melalui persyaratan yang ditentukan diharapkan akan terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang mengarah pada perbaikan status kesehatan anak-anak dan ibu hamil, serta perbaikan tingkat pendidikan anak-anak RTSM, sehingga secara berangsur rantai kemiskinan dapat diputus





Menanggapi tugas pemerintah untuk mendata RTSM melalui Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP), tampak diskusi yang keras dan alot pada rapat antara Tim BPS Pusat dengan jajaran BPS Provinsi 7 wilayah terpilih SPDKP Tahun 2007 Putaran-1

## Sasaran PKH

PKH hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria rumah tangga sangat miskin yang melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. Kewajiban RTSM adalah memeriksakan anggota keluarganya ke PUSKESMAS dan atau menyekolahkan anaknya dengan tingkat kehadiran sesuai ketentuan.

## Tujuan

Tujuan umum pendataan SPDKP adalah:

Mendapatkan data daftar nama dan alamat RTSM calon penerima manfaat PKH serta fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar .

Tujuan khusus pendataan SPDKP adalah:

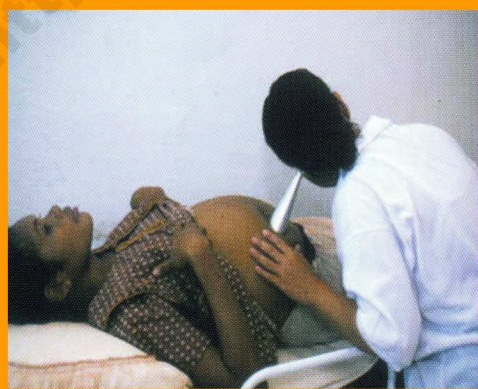
- a. Menyediakan keterangan demografi, pendidikan dan kesehatan setiap anggota RTSM serta keterangan perumahan RTSM yang memenuhi kriteria PKH yaitu rumah tangga yang mempunyai:
  - Balita (anak usia dibawah 5 tahun)
  - Anak usia sekolah wajib pendidikan dasar (usia 5-17 tahun)
  - Wanita hamil



Anak balita



Anak usia sekolah



Wanita hamil

Untuk menentukan calon penerima bantuan tunai melalui PKH, BPS ditugaskan pemerintah untuk melakukan pendataan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP). Pada tahun 2007, SPDKP dilakukan dalam 2 putaran, SPDKP Putaran-1 dilakukan pada bulan April-Juli 2007 dan Putaran-2 dilakukan pada bulan Agustus-Nopember 2007. SPDKP Putaran-1 diselenggarakan untuk menjangkau RTSM yang memenuhi syarat untuk implementasi PKH TA 2007, sedangkan pelaksanaan Putaran-2 dimaksudkan untuk memperoleh RTSM bagi pelaksanaan PKH TA 2008



- b. Menyediakan keterangan tentang keberadaan pelayanan dasar kesehatan bagi anak dan ibu hamil, seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes, Klinik Desa, Bidan Desa, Mantri Kesehatan, Posyandu,
- c. Menyediakan keterangan tentang keberadaan pelayanan pendidikan dasar SD dan SMP dan yang sederajat.



Puskesmas adalah salah satu fasilitas pelayanan dasar kesehatan yang tercakup dalam SPDKP 2007



SD adalah salah satu fasilitas pelayanan pendidikan dasar yang tercakup dalam SPDKP 2007

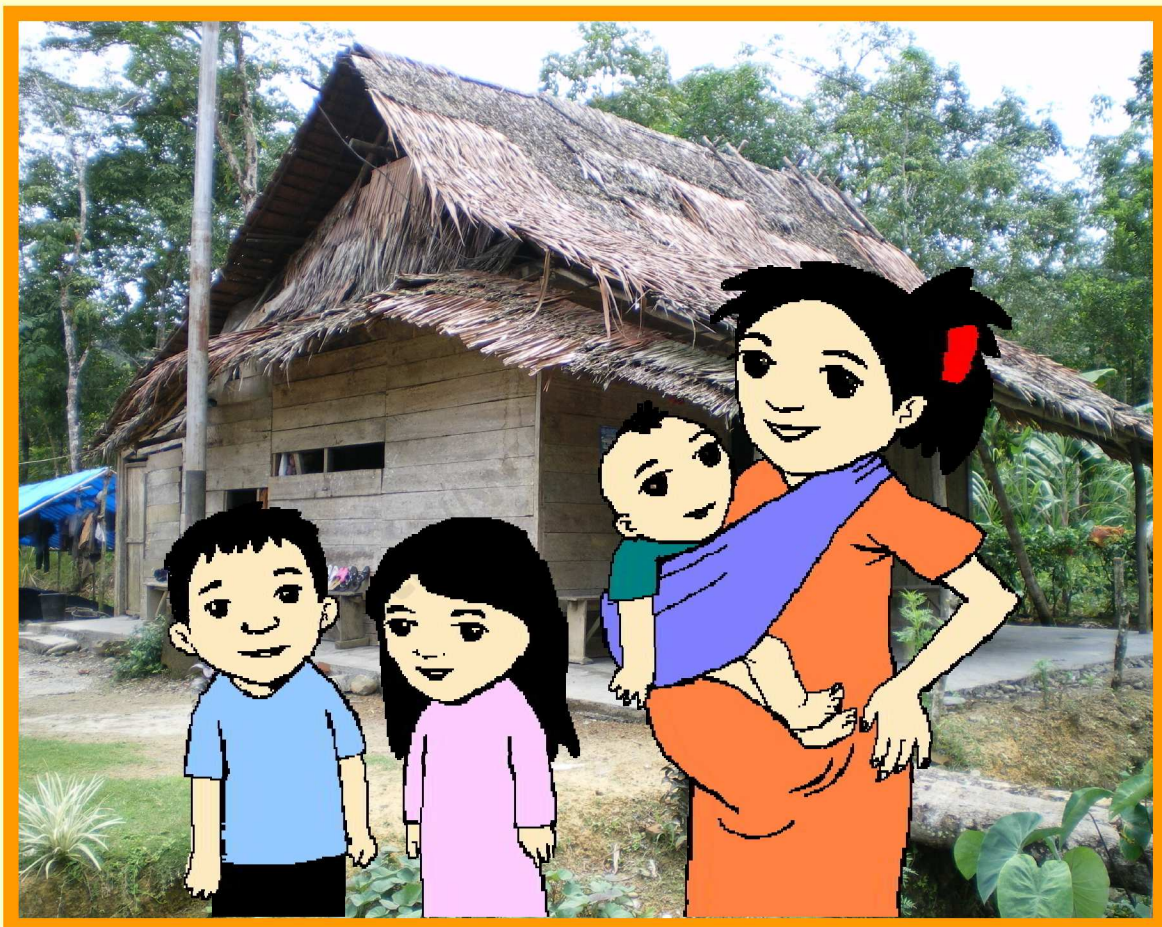


## Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) didasarkan pada:

- Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik,
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik,
- Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006 tentang rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan SPDKP, di banyak kabupaten/kota persiapan SPDKP telah dikoordinasikan dengan instansi terkait.



Rumah Tangga Sangat Miskin yang memenuhi 3 kriteria PKH (ada anak balita, anak usia sekolah, dan wanita hamil)



# BAB 2

# PERENCANAAN 2

Untuk memperoleh data dengan tingkat kesalahan minimal, pelaksanaan SPDKP melalui suatu perencanaan yang matang dan sistematis yang mencakup: penyusunan instrumen, uji coba SPDKP, cakupan wilayah, cakupan data, perencanaan anggaran, koordinasi BPS Pusat dan Daerah, dan koordinasi BPS Provinsi dan BPS kabupaten/kota.

## Penyusunan Instrumen

Perencanaan kegiatan pendataan SPDKP mencakup penyusunan instrumen untuk menjangkau calon RTSM yang layak memenuhi kriteria PKH. Melalui rapat interdep yang dihadiri berbagai instansi pemerintah tingkat pusat seperti, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Departemen Sosial (Depsos), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Departemen Agama (Depag), Departemen Kesehatan (Depkes) dan PT Pos, maka Tim Teknis BPS Pusat menyusun instrumen yang dapat memenuhi tujuan PKH dan datanya dapat digunakan berbagai sektor pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Penyusunan instrumen SPDKP melalui proses yang cukup panjang, berawal dari diskusi dengan Bappenas sebagai perencana kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal BPS dan rapat interdep yang melibatkan berbagai instansi pemerintah



Untuk membantu kelancaran kegiatan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan dibentuk Sekretariat SPDKP yang berlokasi di Gedung 6 Lt. 5 BPS  
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat 10710, Tel: 3810291 Ext. 2105  
Fax: 3507050 Email: sek\_spdkp@mailhost.bps.go.id



## Uji Coba SPDKP

Uji coba sebagai bagian dari perencanaan kegiatan SPDKP dilakukan 2 kali dalam tahun anggaran yang berbeda. Uji coba pertama dilaksanakan di akhir tahun 2006 di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan fokus pada metode pendataan RTSM dan fasilitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Uji coba kedua dilaksanakan di awal tahun 2007 di Kabupaten Gresik dengan fokus pada metode penyisiran.



Hamonangan Ritonga, Ketua Tim Teknis Materi SPDKP didampingi Soegiri Soetardi Kepala BPS Kabupaten Bandung sedang memberi pengarahan di depan peserta pelatihan petugas uji coba SPDKP. Pelatihan petugas berlangsung di Bandung, pada tanggal 19-20 Nopember 2006

Secara umum, uji coba SPDKP di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19-26 Desember 2006 bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam rangka persiapan kegiatan pendataan SPDKP tahun 2007 Putaran-1 di 7 provinsi.

Secara khusus kegiatan uji coba bertujuan untuk:

- Mendeteksi berbagai kelemahan instrumen (kuesioner dan buku pedoman).
- Mengkaji metode pengolahan baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- Menentukan organisasi lapangan yang efektif di daerah.
- Mengestimasi waktu efektif yang dibutuhkan dalam pencacahan di daerah.





Sebanyak 18 petugas tampak sedang mempelajari kuesioner uji coba SPDKP di bawah bimbingan 2 orang Instruktur Nasional BPS. Petugas terdiri dari 6 tim pencacah rumah tangga (setiap tim terdiri dari 2 orang), 2 orang pengawas pencacahan rumah tangga, 3 orang petugas pencacah potensi fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan 1 orang pengawas



Beberapa petugas uji coba SPDKP sedang mengikuti *Role Playing* atau rekonstruksi awal kegiatan pencacahan. Dalam *Role Playing* petugas diberi kesempatan mempraktekkan materi yang didapat di kelas kepada responden yang sengaja didatangkan ke dalam kelas. Instruktur Nasional BPS mengawasi dan memberikan arahan cara berwawancara dan mengisi kuesioner SPDKP dengan tepat



Beberapa petugas uji coba SPDKP di Kabupaten Bandung sedang mendapat pengarahan dari Instruktur Nasional BPS sebelum turun ke lapangan. Rumah kediaman KSK Kecamatan Ngamprah, Deddy Riswadi menjadi base camp para petugas yang terlibat dalam kegiatan uji coba SPDKP. Adanya trauma akibat pendataan PSE05 membuat petugas lebih berhati-hati dalam melakukan pendataan uji coba ini



Wynandin Imawan, Koordinator Materi Teknis SPDKP tampak sedang melakukan pengecekan penguasaan konsep RTSM kepada salah satu petugas uji coba





Dua orang petugas uji coba SPDKP di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung sedang mewawancarai responden. Metode wawancara secara tim seperti ini diharapkan dapat mengurangi *moral hazard* dalam setiap kegiatan pencacahan survei atau sensus



Seorang ibu dengan dua orang balita seperti ini merupakan calon penerima manfaat PKH. Diharapkan dengan bantuan tunai yang didapat, nantinya akan dapat meningkatkan kualitas hidup RTSM. PKH mensyaratkan bahwa bantuan PKH harus diterima langsung oleh ibu/wanita dewasa yang mengurus anak dalam rumah tangga tersebut



Beberapa temuan penting dari hasil uji coba di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Gresik adalah:

- (1) Pada uji coba di Desa Sukatani, Kabupaten Bandung terdapat ketidaksesuaian isian variabel antara Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005 (PSE05) pada 325 RTSM dengan tingkat ketidaksesuaian antara 4,5 % sampai dengan 42,1 %. Ketidaksesuaian tertinggi terjadi pada variabel kemiskinan yang dapat dilihat secara kasat mata dan seharusnya relatif tidak berubah, yaitu variabel isian luas lantai per kapita dengan tingkat ketidaksesuaian sebesar 42,1 %, dan variabel sumber air minum dengan tingkat ketidaksesuaian sebesar 37,1 %. Ini mengindikasikan bahwa pendataan secara tim pada uji coba SPDKP lebih baik dibandingkan hanya seorang petugas pada PSE05,
- (2) Metode penyisiran pada uji coba di Kabupaten Gresik yang dilakukan secara terbuka ternyata tidak efektif, khususnya di wilayah-wilayah di mana semua penduduk pada umumnya menginginkan BLT dilanjutkan. Oleh karena itu, penyisiran dilakukan secara diam-diam, namun petugas diminta secara aktif melakukan pengamatan dengan berkeliling di seluruh wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terpilih.
- (3) Ditemukan RTSM yang anaknya sudah sekolah di SD pada usia 5 tahun, dan masih sekolah di SLTP pada usia 18 tahun. Oleh karena itu, usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada usia 7-15 tahun tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada penduduk miskin.
- (4) Pengumpulan data fasilitas dasar kesehatan untuk tingkat kecamatan melalui Puskesmas dan pengumpulan data fasilitas dasar pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ternyata cukup efektif. Oleh karena itu sebelum verifikasi data fasilitas kesehatan dan pendidikan di lapangan, perlu dilakukan pengumpulan data fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan ke kedua sumber tersebut.

Temuan-temuan dari kedua uji coba ini selanjutnya digunakan dalam penyempurnaan kuesioner SPDKP 2007 (Lihat Lampiran) dan mekanisme pendataan lapangan.

## Cakupan wilayah

SPDKP 2007 Putaran-1, sesuai kesepakatan antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota, pemilihan dilakukan mulai dari penetapan kabupaten/kota dilanjutkan dengan pemilihan kecamatan, sedang seluruh desa dalam kecamatan terpilih otomatis terpilih sebagai lokasi uji coba PKH. Seding untuk SPDKP Putaran-2 pemilihan kabupaten/kota didasarkan atas pertimbangan kemiskinan tinggi, wilayah bencana, dan perluasan kecamatan Putaran-1.

SPDKP 2007 Putaran-1 diselenggarakan pada 348 kecamatan yang tersebar di 49 Kabupaten di 7 provinsi sebagai wilayah pelaksanaan uji coba PKH tahun 2007 seperti pada Tabel 2.1, sedang untuk Putaran-2 diselenggarakan pada 615 kecamatan yang tersebar di 97 kabupaten/kota di 15 provinsi sebagai wilayah pelaksanaan uji coba PKH tahun 2008 seperti pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.1. Cakupan Wilayah SPDKP Tahun 2007 Putaran-1**

PROVINSI	JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
Sumatera Barat	1	2
DKI Jakarta	1	3
Jawa Barat	12	73
Jawa Timur	21	192
Nusa Tenggara Timur	7	42
Sulawesi Utara	5	31
Gorontalo	2	5
JUMLAH	49	348

**Tabel 2.2. Cakupan Wilayah SPDKP Tahun 2007 Putaran-2**

PROVINSI	JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN
Nanggroe Aceh Darussalam	4	25
Sumatera Utara	4	41
DKI Jakarta	3	11
Jawa Barat	15	77
Jawa Tengah	13	137
DI Yogyakarta	5	78
Jawa Timur	22	100
Banten	2	8
Nusa Tenggara Barat	2	5
Nusa Tenggara Timur	7	29
Kalimantan Selatan	5	31
Sulawesi Utara	5	23
Sulawesi Tengah	3	15
Gorontalo	4	17
Papua Barat	3	18
JUMLAH	97	615

## Cakupan Data

- Keberadaan anak usia 0 - 17 tahun.
- Keberadaan Wanita Usia Subur (WUS) usia 10-49 tahun yang sedang hamil.
- Keterangan umum anggota rumah tangga (ART) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status perkawinan, pendidikan, pekerja anak, dan kecacatan.
- Nama dan alamat tempat pelayanan kesehatan bila memeriksakan balita/kehamilan atau nama dan alamat tempat pelayanan kesehatan yang diinginkan bila dia belum/tidak memeriksakannya.
- Nama dan alamat sekolah dari ART yang sekolah atau nama dan alamat sekolah yang diinginkan bila ART tidak sekolah.
- Keterangan pekerja anak menurut lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan jumlah jam kerja dalam seminggu.
- Keterangan perumahan dan rumah tangga.



Suasana rapat evaluasi kegiatan pencacahan uji coba SPDKP yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2006 di Ruang Pertemuan Kantor BPS Provinsi Jawa Barat. Rapat ini membahas masalah-masalah yang ditemui saat pencacahan

## Perencanaan Anggaran

Kegiatan SPDKP direncanakan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2007- 2009 dengan target 6,5 juta RTSM. Kegiatan SPDKP Tahap I (Tahun 2007) ditargetkan akan memperoleh sebanyak 1,2 juta RTSM, Tahap II (Tahun 2008) ditargetkan akan diperoleh sebanyak 2,5 juta RTSM, dan Tahap III (Tahun 2009) ditargetkan akan diperoleh sebanyak 2,8 juta RTSM. Perkiraan seluruh biaya untuk kegiatan SPDKP Tahap I sampai III diperkirakan sebesar Rp 900,0 milyar.

Untuk kegiatan persiapan SPDKP yang dilaksanakan mulai akhir tahun anggaran 2006, BPS memanfaatkan sisa pembiayaan yang tersedia untuk kegiatan PSE05. Kegiatan persiapan yang dilaksanakan di tahun 2006 yaitu kegiatan uji coba di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Gresik, untuk kegiatan uji coba kuesioner dan metodologi penyisiran, penyusunan buku pedoman, dan organisasi lapangan, termasuk pendataan pelayanan dasar baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa.

Pembiayaan yang tersedia untuk kegiatan SPDKP Tahap I (tahun 2007) sebesar Rp 134,4 milyar ditampung dalam anggaran 54 DPS tahun 2007 pada MAK 521119 yaitu Belanja Barang Operasional Lainnya dalam bentuk paket pembiayaan karena sampai dengan DIPA anggaran 54 selesai ditandatangani cakupan wilayah PKH belum dapat ditentukan. Yang berakibat alokasi anggaran tidak dapat ditentukan untuk masing-masing lokasi pendataan.

Kegiatan SPDKP Tahap I direncanakan akan dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran-1 rencananya dilaksanakan pada Bulan Januari-Juni 2007 dengan dasar hitung jumlah wilayah administrasi, target RTSM, alokasi sampel dan jumlah petugas untuk memperoleh 500.000 RTSM diperkirakan memerlukan pendataan terhadap 700.000 rumah tangga dengan biaya sekitar Rp 54,0 milyar. Untuk SPDKP Tahap I Putaran-2 direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Juli-Desember 2007 untuk memperoleh sekitar 700.000 RTSM diperkirakan memerlukan pendataan terhadap 1.000.000 rumah tangga dengan biaya sekitar Rp 80,4 milyar.

Biaya SPDKP untuk BPS daerah ditransfer melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) ditujukan ke masing-masing BPS provinsi yang dicakup SPDKP, selanjutnya SKPA Anggaran 54 BPS provinsi ditransfer ke masing-masing BPS kabupaten/kota secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Pembiayaan SPDKP 2007 secara umum dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan persiapan, pencacahan, pengolahan data, dan verifikasi sampai diperoleh data final RTSM. Alokasi pembiayaan SPDKP (POK) untuk masing-masing BPS kabupaten/kota sepenuhnya diserahkan ke BPS provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan.

Berdasarkan hasil rapat Tim Interdep, ditetapkan lokasi SPDKP07 Putaran-1 dilaksanakan di 7 provinsi, 49 kabupaten/kota, 348 kecamatan, dan di 4.551 desa, alokasi pembiayaan untuk kegiatan BPS daerah sebesar Rp 46,6 milyar dan BPS Pusat sebesar Rp 7,4 milyar. Untuk Putaran-2 dilaksanakan di 15 provinsi, 97 kabupaten/kota, 615 kecamatan, dan 7.533 desa, alokasi pembiayaan untuk kegiatan BPS daerah sekitar 73,4 milyar dan BPS Pusat sekitar 7,0 milyar.

Untuk kegiatan SPDKP tahap selanjutnya (2008-2009) sampai dengan penetapan pagu anggaran BPS tahun 2008 tidak diperoleh alokasi pembiayaan yang diusulkan BPS sebesar Rp 350,0 milyar untuk pendataan terhadap sekitar 3.000.000 rumah tangga dan diperoleh data RTSM sebanyak 2.500.000 RTSM.



## Koordinasi BPS Pusat dengan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan SPDKP, dipandang perlu dilakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan SPDKP. Materi yang dibahas dalam Rakor mencakup kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan SPDKP. Pada tahun 2007, BPS menyelenggarakan 2 kali Rakor untuk pelaksanaan SPDKP Putaran-1 dan Putaran-2.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan SPDKP bertujuan untuk memberikan arah, menyamakan persepsi, memperoleh umpan balik, dan merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai kemungkinan tantangan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan SPDKP.



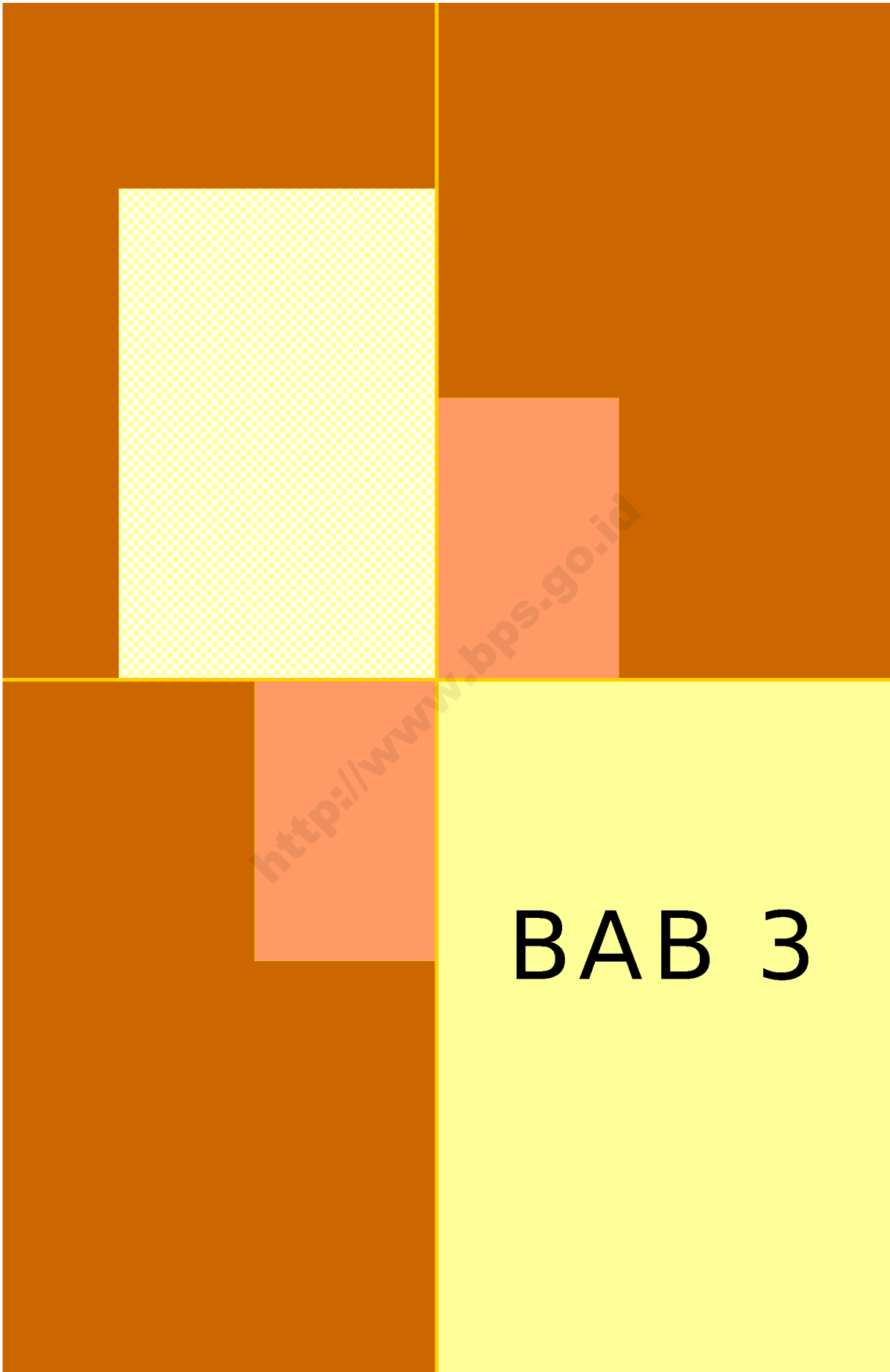
Dr. Bambang Widianto Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang SDM dan Kemiskinan sedang memberikan penjelasan perihal Program Keluarga Harapan pada peserta Rapat Koordinasi SPDKP di Surabaya



Kepala BPS, Rusman Heriawan didampingi Moerdianto Ketua Penyelenggara rapat koordinasi SPDKP 2007 dan Wynandin Imawan Koordinator Tim Teknis Materi SPDKP, pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) Tahun 2007 Putaran-2



Rakor SPDKP Tahun 2007 Putaran-2 di Surabaya, tanggal 24-27 Juli 2007 dihadiri oleh seluruh Kepala BPS Provinsi, serta Kepala Bidang Integrasi dan Pengolahan Data Statistik, Kepala Bidang Statistik Sosial, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Ketahanan Sosial, Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data, dan Kepala Sub Bagian Keuangan dari 15 BPS Provinsi yang terpilih SPDKP 2007 Tahap I Putaran-2, serta 98 Kepala BPS Kabupaten/Kota terpilih SPDKP 2007

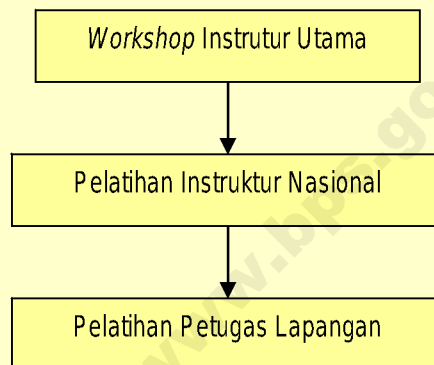


# BAB 3

# PELATIHAN 3

Salah satu tahapan strategis sebelum pelaksanaan pengumpulan data di lapangan adalah pelatihan petugas. Pelatihan petugas adalah proses penyampaian konsep dan definisi dari setiap keterangan yang akan dikumpulkan dengan tujuan umum agar petugas mempunyai pemahaman yang sama atas batasan-batasan dari keterangan yang dikumpulkan serta mengerti tujuan pendataan. Melalui pelatihan petugas juga diajarkan tugas dan tanggung jawabnya termasuk jadwal penyelesaian pekerjaan. Pelatihan dalam rangka SPDKP dilakukan secara berjenjang atau terstruktur melalui dua tahapan pelatihan untuk pelatih (ToT) dan satu tahapan pelatihan untuk petugas pendata di lapangan (Gambar 3.1).

**Gambar 3.1. Tahap Pelatihan SPDKP 2007**



## Workshop Instruktur Utama

Workshop Instruktur Utama adalah diskusi intensif antara Instruktur Utama (Intama) dengan Tim Teknis SPDKP mengenai semua aspek teknis SPDKP, khususnya kriteria RTSM serta konsep dan definisi dari setiap keterangan yang dikumpulkan.

Uzair Suhaimi, Ketua Tim Teknis Targeting SPDKP sedang memimpin diskusi dua arah antara calon Intama dengan Master Intama mengenai metode *Proxy Mean Test* untuk menentukan RTSM yang layak sebagai calon penerima bantuan PKH







Acara presentasi pengalaman lapangan dari daerah, tampak Jamal Kepala BPS Provinsi Jawa Timur sedang menyajikan Pengelolaan Pembiayaan SPDKP07 Daerah, dengan moderator Subagio DW Sekretaris Utama dan Moerdianto selaku ketua umum penyelenggara Rakor



Peserta Rakor SPDKP 2007 sedang menyimak materi yang disampaikan Pimpinan BPS. Dari Rakor ini diperoleh kesepakatan bersama antar jajaran BPS, baik jajaran BPS Pusat, BPS provinsi, maupun BPS kabupaten/kota mengenai implementasi SPDKP dalam rangka pelaksanaan PKH Tahun Anggaran 2008. Melalui Rakor ini semua jajaran BPS juga diharapkan memahami pentingnya tugas BPS pada pelaksanaan SPDKP, yaitu melaksanakan pendataan rumah tangga sangat miskin yang memenuhi syarat sebagai calon peserta PKH; memahami metode pendataan dalam pelaksanaan SPDKP Tahun Anggaran 2007; dan memahami tata laksana administrasi dan anggaran yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BPS terutama dengan adanya peraturan-peraturan baru dalam pengelolaan anggaran



Presentasi Pembelajaran SPDKP 2007 Tahap I Putaran-1 dari daerah diwakili oleh: BPS Provinsi Jawa Barat (Sri Dady), BPS Provinsi Gorontalo (Bibit), BPS Kabupaten Tulungagung (Lilik Wibawati), dan BPS Kota Manado (Olden Lahamendu), dengan didampingi moderator M. Sairi Hasbullah Ketua Tim Teknis Evaluasi Data SPDKP dan Hamonangan Ritonga Ketua Tim Teknis Materi SPDKP Tahun 2007. Dengan pembelajaran ini peserta lainnya dapat memetik pengalaman berharga, sehingga dapat dijadikan contoh untuk pelaksanaan SPDKP berikutnya



Rapat Koordinasi Nasional di Surabaya, antara lain menghadirkan pembicara dari Bappenas yaitu Dr. Bambang Widianto yang menjelaskan Implementasi PKH dan dari Depsos yaitu Drs. Chazali Situmorang, MSc. yang menjelaskan koordinasi dalam rangka PKH, dengan moderator Arizal Ahnaf Deputi Bidang Statistik Sosial BPS



## Koordinasi BPS Provinsi dengan BPS Kabupaten/Kota

Sambutan Kepala BPS Pada  
Pembukaan Rapat Koordinasi Tingkat Daerah SPDKP 2007 Putaran ke 2

Assalamualaikum Wr.Wb, Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Saudara-saudaraku sekalian para peserta Rakorda yang saya hormati,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya juaah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan untuk selanjutnya semoga ridhonya akan selalu dilimpahkan kepada kita semua.

Saudara-saudara sekalian.

Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan pokok pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membebaskan manusia dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas manusia dalam berbagai dimensinya. Melalui Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*), persoalan kemiskinan saat ini menjadi salah satu tujuan pokok pembangunan dunia. Ini memberi makna bahwa persoalan kemiskinan merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan yang sangat serius pula.

Terkait dengan kemiskinan, pemerintah Indonesia saat ini tengah dengan gencar melaksanakan berbagai program penanggulangan baik melalui berbagai kebijakan makro yang bersifat tidak langsung maupun melalui berbagai kebijakan yang bersifat langsung. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat langsung, dan bantuan untuk masyarakat miskin, dilakukan melalui berbagai bentuk program seperti Askeskin, Beras untuk Orang Miskin (Raskin), BLT, dan berbagai bentuk program yang lainnya. Pada saat ini pemerintah pun memperkaya program penanggulangan kemiskinan dengan lebih menyeluruh dan transformatif yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah Program Perlindungan Sosial melalui pemberian bantuan tunai. Bantuan tersebut diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pemanfaat PKH dipersyaratkan untuk mengirim anaknya (0-6) dan membawa ibu hamil ke Puskesmas, dan atau menyekolahkan anak usia 5- 17 tahun.

Seperti telah berulang kali saya singgung dalam berbagai kesempatan bahwa salah satu tujuan pokok PKH adalah untuk mengubah kehidupan keluarga yang sangat miskin ke tingkat mutu kehidupan yang lebih baik yaitu dengan cara memutus pewarisan kemiskinan melalui pengembangan SDM usia dini dari RTSM.

Untuk mencapai tujuan tersebut melalui PKH diupayakan untuk mengubah perilaku keluarga miskin agar memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Program ini juga akan mendorong daerah untuk menyediakan prasarana pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan. Perlu saya tekankan bahwa Program ini juga dimaksudkan sebagai cikal-bakal sistem jaminan sosial.

Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa PKH hanya mungkin dapat terlaksana jika didukung oleh ketersediaan data yang akurat tentang RTSM. Untuk memenuhi maksud tersebutlah kita melakukan SPDKP. Mengapa SPDKP ini dilaksanakan oleh BPS? Seperti telah berulang kali kita singgung sebelumnya, ini tidak lain karena BPS adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap penyediaan data, termasuk dalam hal penyediaan data kemiskinan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa penyediaan data kemiskinan yang dilakukan oleh BPS selama ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data Susenas, sedangkan pendekatan mikro melalui pelaksanaan PSE0-05 dan SPDKP 2007. Berbagai sumber data yang saya sebutkan ini sama pentingnya yang akan saling melengkapi dalam rangka memperkaya ketersediaan data kemiskinan di Indonesia.

.....

Semoga Tuhan selalu memberi rahmatnya kepada kita semua.

Jakarta, Agustus 2007



Rapat Koordinasi antara BPS Provinsi dengan BPS Kabupaten/Kota yang terkena sampel SPDKP tahun 2007 di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tampak dalam gambar Poltak Sutrisno Siahaan Kepala BPS Provinsi NTT sedang memberikan pengarahan kepada peserta rakorda dengan didampingi oleh Dominggus J.S. Para Ede Kepala Tata Usaha BPS Provinsi NTT



Sunari Sarwono Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta sedang memberikan pengarahan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Daerah SPDKP Putaran-2 Tahun 2007 di Jakarta pada tanggal 15-16 Agustus 2007





Para peserta Rakorda SPDKP Putaran-2 se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan seksama mengikuti pengarahan pada acara pembukaan



Peserta Rapat Koordinasi SPDKP Tahun 2007 Putaran-2 di Provinsi DKI Jakarta dalam sesi tanya jawab



Kepala BPS Rusman Heriawan memberikan pengarahan pada Rakorda SPDKP tahun 2007 Putaran-2 se-Provinsi DKI Jakarta



Uzair Suhaimi Ketua Tim Teknis Targeting SPDKP sedang menyajikan materi Kriteria RTSM yang dicakup SPDKP kepada peserta Rakorda Provinsi DI Yogyakarta, didampingi Tjokro Hendro Mukti Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Provinsi DI Yogyakarta





Wynandin Imawan, Koordinator Tim Teknis Materi SPDKP tampak sedang mengetuk palu sebagai tanda pembukaan Rapat Koordinasi Daerah Kegiatan SPDKP tahun 2007 Provinsi DI Yogyakarta, yang diselenggarakan di Magelang Jawa Tengah pada tanggal 27-28 Agustus 2007. Tampak R. Lukito Praptoprijoko Kepala BPS Provinsi DI Yogyakarta mendampingi dalam acara pembukaan Rakorda tersebut



Thoman Pardosi dan Riniarti dari BPS DI Yogyakarta sedang memimpin diskusi strategi menghadapi pendataan SPDKP Tahun 2007 Putaran 2 yang dilaksanakan secara sensus di Provinsi DI Yogyakarta





Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Kalimantan Selatan, tanggal 15-18 Nopember 2007. Tampak dalam gambar Bambang Pramono Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan didampingi para kepala bidang BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Tampak pada gambar para peserta Rakorda se-Provinsi Kalimantan Selatan sedang menyimak materi yang disajikan



## Pelatihan Instruktur Nasional

Instruktur Nasional (Innas) diharapkan tidak saja memiliki kemampuan memahami dan mengajarkan konsep definisi tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi dalam menjaga kehandalan mutu data SPDKP. Dengan adanya otonomi daerah, BPS dituntut mampu menyediakan data wilayah dan ruang (*spatial data*) yang bermutu dan bermanfaat bagi konsumen. Untuk itu peran Innas menjadi sangat menentukan.



Kepala BPS, Rusman Heriawan didampingi Arizal Ahnaf Deputy Bidang Statistik Sosial dan Wynandin Imawan sebagai Koordinator Tim Teknis Materi SPDKP dalam acara pembukaan pelatihan calon Innas SPDKP di Cisarua, 26-29 Maret 2007

Pelaksanaan Pelatihan Innas pada tahun 2007:

Putaran-1: Diselenggarakan di Cisarua, Provinsi Jawa Barat tanggal 26-29 Maret 2007 diikuti sebanyak 147 peserta.

Putaran-2: Diselenggarakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 6-9 Agustus 2007 diikuti sebanyak 185 peserta.



Calon Innas SPDKP tahun 2007 sedang mendengarkan pengarahan pada pembukaan pelatihan Innas. Pelatihan Innas SPDKP dilakukan dengan sistem diskusi dalam kelas, dipimpin oleh Instruktur Utama (Intama) dan Master Intama dengan menggunakan buku pedoman dan kuesioner yang telah disiapkan



Pembukaan Pelatihan Petugas SPDKP tahun 2007 di Kota Manado, tanggal 1-5 April 2007. Tampak dalam gambar dari kiri ke kanan: Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi Sulawesi Utara Kelengi Meliala, Wakil Walikota Manado, dan Kepala BPS Kota Manado Olden Lahamendu





Para peserta pelatihan petugas SPDKP 2007 di Kota Manado sedang mendengarkan sambutan dari Wakil Walikota Manado



**Pembukaan Pelatihan Petugas SPDKP07 Putaran II Kab. Ciamis  
HOTEL BUDI FAMILI, CIAMIS**

Pembukaan pelatihan petugas SPDKP 2007 di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan di Ciamis pada Agustus 2007. Pembukaan dihadiri oleh Asisten Daerah III Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Kepala BPS Kabupaten Ciamis dan Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat





Simbolisasi Petugas SPDKP07 Putaran II Kab. Ciamis oleh Asisten Daerah III

Asisten Daerah III Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyerahkan secara simbolis sebuah topi kepada petugas SPDKP 2007, pada acara pembukaan pelatihan petugas SPDKP 2007



Suasana distribusi ATK pada para petugas lapangan SPDKP 2007 Putaran-1 di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur



Innas Pusat dan Innas Daerah bersama-sama mengajarkan konsep, definisi, dan tata cara pengisian kuesioner kepada petugas lapangan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Tampak dalam gambar Masfufah (Innas Pusat) dan Agnes Pora Niron (Innas Daerah) sedang mengajar dalam pelatihan petugas di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur



Suasana pelatihan SPDKP 2007 Putaran-1 Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan di Alor

## Pelatihan Petugas Pengolahan Data

Selain pelatihan petugas pencacah, dilakukan juga pelatihan bagi petugas pengolah data sebagai berikut:

- Untuk Putaran-1:  
Pada tanggal 11-14 Maret 2007 di Surabaya (bersamaan dengan Rakornas) yang diikuti oleh 49 kepala seksi IPDS atau staf yang bertanggung jawab di bidang pengolahan di kabupaten/kota terpilih
- Untuk Putaran-2:  
Pada tanggal 3-6 September 2007 di Semarang yang diikuti oleh 97 kepala seksi IPDS atau staf yang bertanggung jawab di bidang pengolahan di kabupaten/kota terpilih.

Materi pokok pengolahan secara umum terbagi atas teknis pengolahan dan programming.

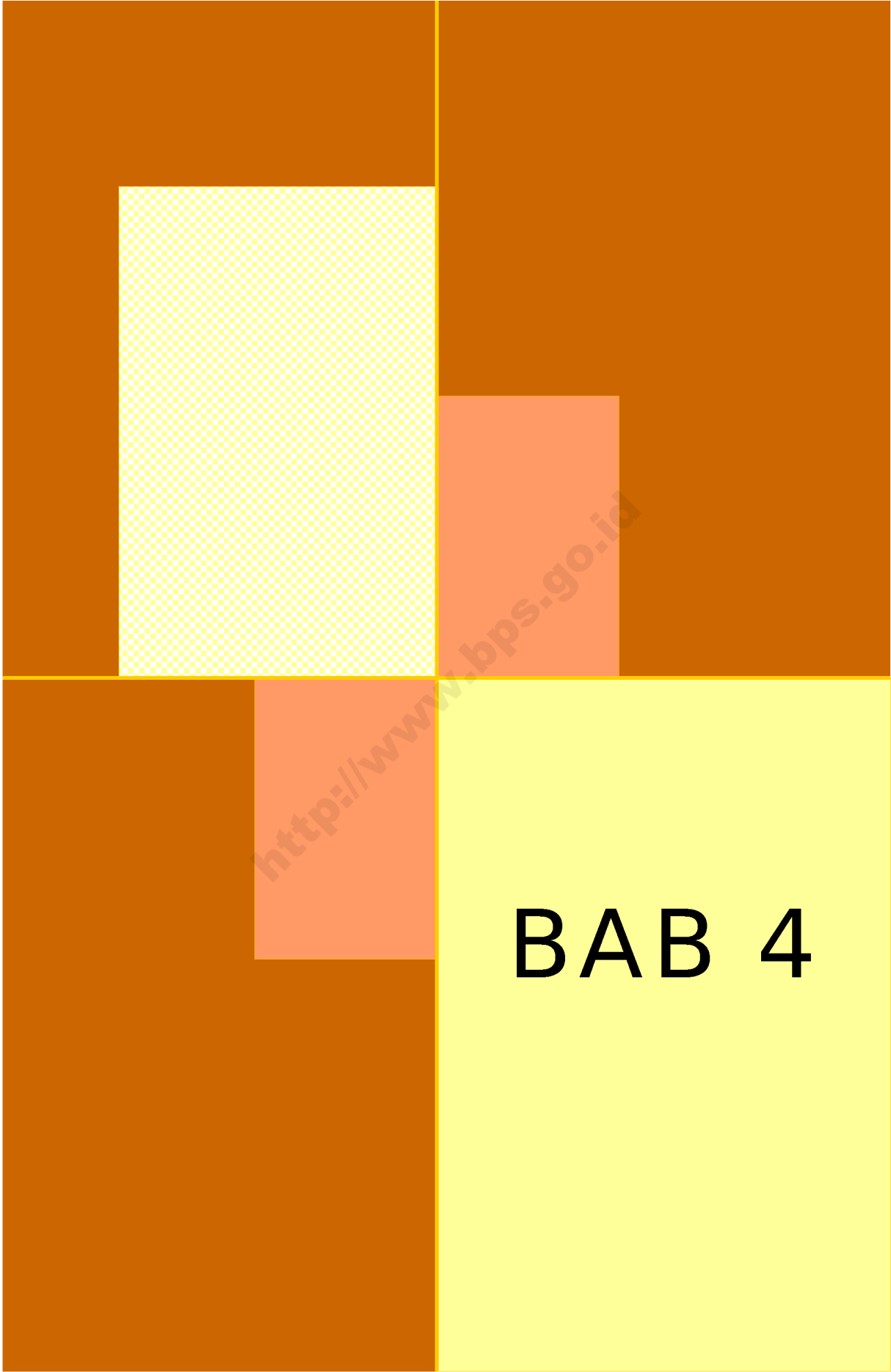

Materi teknis pengolahan meliputi:

- \* Pra komputer berupa penerimaan, *batching*, dan *editing* dokumen,
- \* Proses komputer berupa perekaman data ke media komputer (*data entry*) dan validasi,
- \* Pasca komputer berupa pencetakan hasil perekaman dokumen pendataan untuk keperluan *editing* dan *up-dating*,
- \* Pengiriman file.

Materi *programming* meliputi:

1. Pengenalan umum programming,
2. *Install* dan *set up software* program,
3. Sistem kompilasi, dan
4. Sistem *up dating*.





# BAB 4

## PENDATAAN 4

Hasil pendataan SPDKP akan diperoleh daftar rumah tangga sangat miskin (RTSM) calon penerima manfaat PKH, diharapkan data yang diperoleh tidak mengandung kesalahan sekecil apapun “zero error”. Untuk mencapai hal ini dimulai dengan membangun organisasi lapangan yang tepat, pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar secara menyeluruh (tidak lewat cacah), pendataan RTSM sesuai mekanisme yang ditetapkan dan pengawasan dari seluruh jajaran Tim BPS.



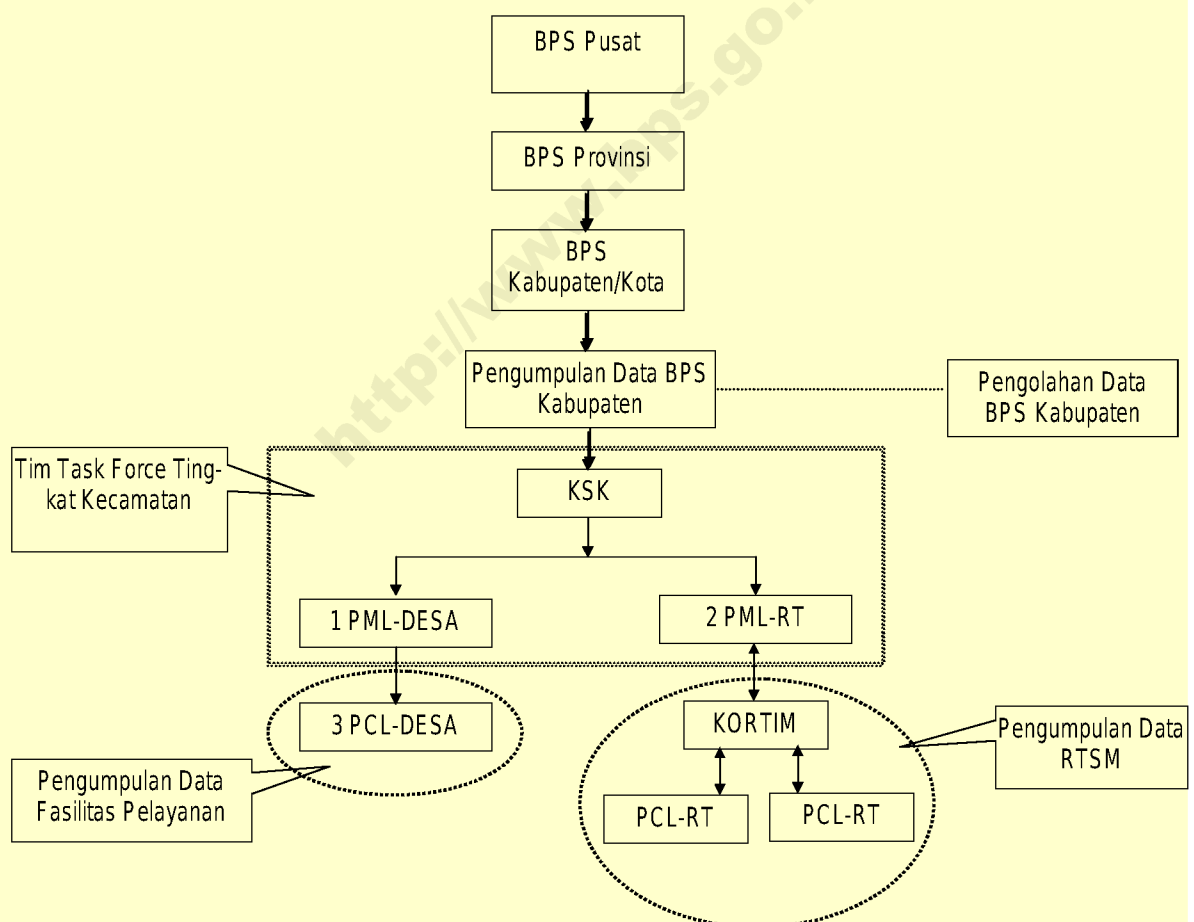
Petugas pencacah SPDKP melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Tampak seorang Kortim melakukan penyisiran RTSM di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat (gambar atas). Tim pencacah SPDKP BPS Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi di Desa Sungai Bangkal, Kecamatan Sungai Tabuk (gambar kiri bawah). Seorang petugas TF dengan sepeda motor melewati jembatan gantung untuk menuju lokasi di Desa Lok Untar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (gambar kanan bawah)

## Organisasi Lapangan

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SPDKP dibutuhkan organisasi lapangan yang tepat sehingga pembagian tugas dan hubungan koordinatif antar pelaksana menjadi jelas, demikian juga hubungan kerja intruksional antara satuan kerja pengendali dengan satuan kerja pelaksana.

Diharapkan tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan tanggung jawab setiap satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan SPDKP, secara garis besar organisasi lapangan SPDKP dapat dilihat pada Gambar 4.1.

**Gambar 4.1.**  
**Organisasi Lapangan Pendataan SPDKP**

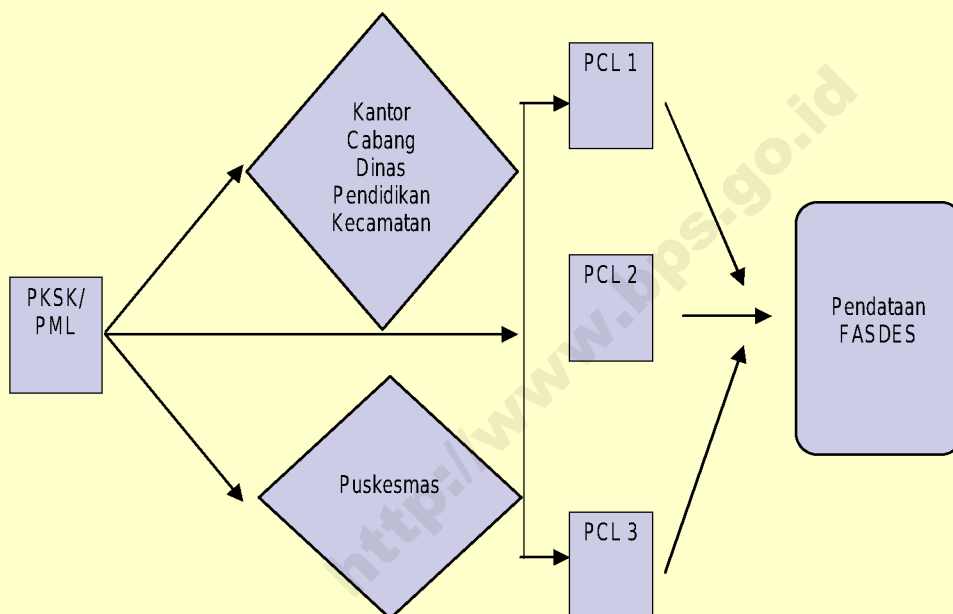




## Pendataan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Dasar

Pendataan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar merupakan bagian dari kegiatan SPDKP yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang tersedia di setiap desa/kelurahan. Pendataan pelayanan fasilitas dimaksudkan untuk melihat kesiapan kecamatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Selain itu data yang diperoleh nantinya juga berguna bagi pemerintah daerah guna meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dasar.

**Gambar 4.2**  
**Mekanisme Pendataan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan**



Pengumpulan data fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar dilakukan untuk seluruh desa/kelurahan di kecamatan terpilih SPDKP. Pengumpulan data dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Apabila kecamatan terpilih pada waktu pelaksanaan pencacahan mengalami pemekaran, maka pencacahan hanya dilakukan di kecamatan induk. Wawancara dilakukan kepada orang yang mengetahui secara benar dan tepat informasi terkait tempat pelayanan pendidikan dan kesehatan tersebut. Sehingga respondennya adalah kombinasi antara perangkat desa dan pengelola institusi. Untuk mendapatkan data yang tepat dan *up to date*, petugas pencacah perlu melihat secara langsung bukti-bukti terkait informasi yang diberikan

Petugas pencacah fasilitas kesehatan dan pelayanan dasar mengumpulkan keterangan tempat pelayanan dasar kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Klinik Desa, Bidan Desa, Mantri Kesehatan, Klinik dan Posyandu, bagi anak dan ibu hamil. Selain itu juga dikumpulkan keterangan tentang sarana dan prasarana dasar pendidikan SD sederajat dan SLTP sederajat yang dapat dinikmati RTSM



Petugas pencacah perlu mengkonfirmasi data fasilitas kesehatan dan pendidikan ke Kantor Kecamatan dan Kantor Desa/Kelurahan sebelum mencacah fasilitas pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Gambar atas:

Kantor Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Gambar bawah:

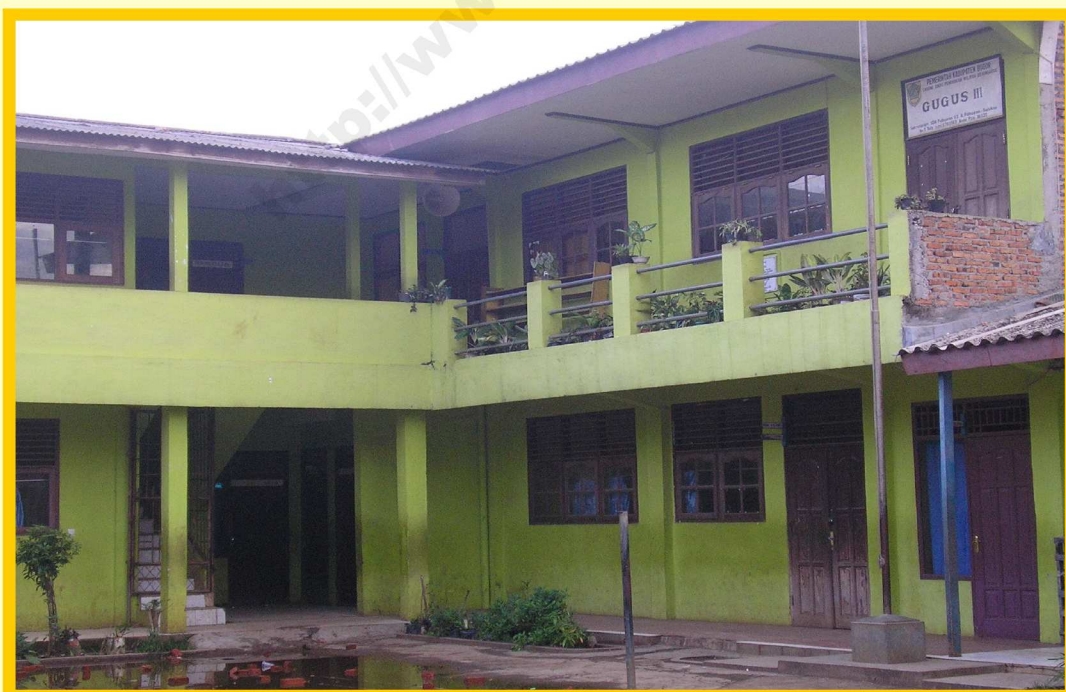
Kantor Desa Ayula Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo



**STATISTIK SD NGAMPRAH I  
DINAS P & K  
KEC. NG MP AH**

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	NSS	NSB	Jumlah Kelas	Keberadaan Meja Kursi	Jumlah Guru PNS	Kehadirannya	Jumlah Guru Tidak Tetap	Jumlah Murid	Rombel	Salah satu fasilitas	Salah satu fasilitas
1	SDN 001	Desa 001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
2	SDN 002	Desa 002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002
3	SDN 003	Desa 003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
4	SDN 004	Desa 004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004
5	SDN 005	Desa 005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005
6	SDN 006	Desa 006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006
7	SDN 007	Desa 007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007
8	SDN 008	Desa 008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008
9	SDN 009	Desa 009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009
10	SDN 010	Desa 010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
11	SDN 011	Desa 011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
12	SDN 012	Desa 012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
13	SDN 013	Desa 013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
14	SDN 014	Desa 014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
15	SDN 015	Desa 015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
16	SDN 016	Desa 016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016
17	SDN 017	Desa 017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017
18	SDN 018	Desa 018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018
19	SDN 019	Desa 019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019
20	SDN 020	Desa 020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020

Pendataan fasilitas pendidikan dasar dengan mengunjungi SD dan SLTP antara lain mengumpulkan informasi seperti nama sekolah, alamat sekolah, NSS, NSB, jumlah kelas, keberadaan meja kursi, jumlah guru PNS dan kehadirannya, jumlah guru tidak tetap, jumlah murid dan rombel. Sebagian informasi yang dikumpulkan dapat dilihat dari monografi sekolah seperti gambar di atas yang menyajikan monografi SD Ngamprah I di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat



Pendataan SPDKP adalah sensus sehingga data seluruh pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di provinsi ini diketahui secara lengkap. Tampak SDN 03 Desa Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat





Salah satu variabel yang ditanyakan dalam pendataan infrastruktur pendidikan adalah jumlah murid di SD dan SLTP Tampak anak-anak murid SD Puntren, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta



Deddy Riswadi, KSK Kecamatan Ngamprah bersama staf BPS Kabupaten Bandung tampak sedang mewawancarai seorang penanggung jawab posyandu. Informasi yang dikumpulkan antara lain nama dan alamat posyandu, nama ketua, keberadaan pelayanan, jumlah kunjungan tenaga kesehatan, jumlah dan keberadaan penyuluhan, keberadaan timbangan dan jumlah kader aktif

## Pendataan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

Mekanisme pendataan RTSM dimulai dengan melakukan verifikasi pada Daftar nama RTSM tercetak (*pre-printed*). Pada dasarnya kegiatan verifikasi Daftar RTSM dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu:

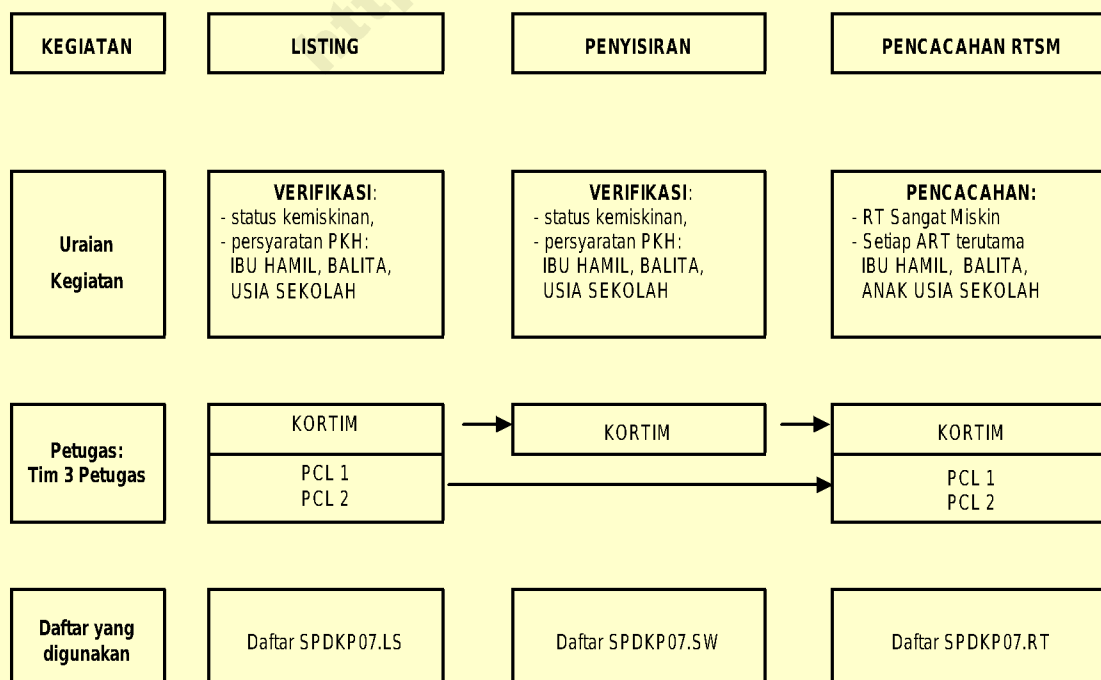
1. Verifikasi data rumah tangga, hasil pendataan PSE 2005 yang dijadikan *frame* SPDKP, disebut metode LISTING.
2. Penyisiran rumah tangga yang dianggap layak menjadi calon penerima manfaat PKH, disebut metode PENYISIRAN

Dari mekanisme pendataan RTSM di atas akan diketahui RTSM yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil usia 10-49 tahun
2. Bayi usia dibawah lima tahun (balita)
3. Anak usia sekolah setingkat SD dan SLTP (5-17 tahun)

Kedua metode pendataan tersebut di atas ditujukan untuk mengurangi kesalahan bahkan membuat data yang dihasilkan SPDKP bebas dari kesalahan (*zero error*). Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab BPS yang ditugaskan pemerintah untuk menyediakan data yang bersifat mikro. Kesalahan dalam penentuan RTSM dapat berdampak luas, yaitu tidak saja merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan, namun juga pada institusi BPS sendiri yaitu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat akan data yang dihasilkan BPS. Mekanisme pendataan RTSM pada setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS), dapat dilihat dari Gambar 4.3.

**Gambar 4.3. Mekanisme Pendataan pada satu SLS**



### KRITERIA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM)

Penentuan kemampuan rumah tangga merujuk pada kemampuan ekonomi. Suatu RT disebut mampu adalah apabila rumah tangga tersebut memenuhi paling tidak TIGA KRITERIA berikut ini:

- Mampu menyediakan makan untuk ART (ada lauk yang berasal dari hewani, misal ayam, telur, daging) sebanyak 3 kali dalam sehari,
- Mampu **membiayai** pengobatan dan perawatan secara medis bila ada ART yang sakit (termasuk transportasi ke fasilitas kesehatan, tidak termasuk yang menerima subsidi dari pemerintah yaitu askeskin/gakin),
- Mampu **membeli** pakaian baru minimal 1 pasang untuk ART setiap tahun (tidak termasuk yang memiliki baju dari pemberian orang lain),
- Mampu menyekolahkan anak/anggota rumah tangga **dengan biaya sendiri** pada jenjang menengah (SMA dan sederajat),
- **Memiliki** aset/barang berharga yang bisa dijual cepat dengan nilai di atas Rp. 500.000, sehingga dapat digunakan untuk biaya hidup minimal selama 3 bulan ke depan, misalkan memiliki tanah, sawah, rumah lain, ternak besar, perhiasan emas, mobil, motor, kulkas, TV berwarna ukuran 21 inch ke atas, dan lain-lain.

**RTSM adalah rumah tangga yang kondisi kehidupannya sangat kekurangan, dengan ciri-ciri umum antara lain:**

- Sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok yang sangat sederhana,
- Biasanya tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah,
- Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga,
- Biasanya tidak/hanya mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan SLTP.

**Dari sisi kondisi fisik serta fasilitas tempat tinggal RTSM biasanya tinggal pada rumah yang:**

- Dinding rumahnya terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester,
- Sebagian besar lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah,
- Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- Luas lantai rumah kecil (biasanya kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang)
- Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya

**PENENTUAN KRITERIA RTSM TIDAK BOLEH SECARA PARSIAL MELAINKAN SECARA HOLISTIK DAN MENDAPAT KLARIFIKASI DARI SUMBER TERPERCAYA SEPERTI RTSM LAINNYA.**





Tampak Tim petugas SPDGP di Kecamatan Mane sedang mencacah di salah satu rumah di Desa Mane. Berkat panduan seorang penunjuk jalan yang juga mengetahui seluk beluk wilayah yang dikunjungi, pencacahan SPDGP di wilayah ini dapat berjalan lancar



Agar pencacahan RTSM dapat berjalan lancar, BPS Kabupaten Bandung bekerjasama dengan TNI Polri dalam melakukan pencacahan SPDGP





Tim secara bersama melakukan verifikasi daftar nama RTSM yang sudah tercetak pada Daftar listing. Semua RTSM tersebut wajib dikunjungi oleh tim agar tim dapat melakukan penilaian terhadap rumah tangga tersebut apakah dapat dikatakan rumah tangga mampu atau tidak mampu atau petugas masih ragu-ragu. Dalam gambar tampak tim SPDGP sedang melakukan pendataan RTSM di Desa Ayula Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo



Pencacahan RTSM yang dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur



**POSKO/BASECAMP SPDKP07 Putaran II Kab. Ciamis  
WISMA KEMBAR PUTRA, PANGANDARAN**

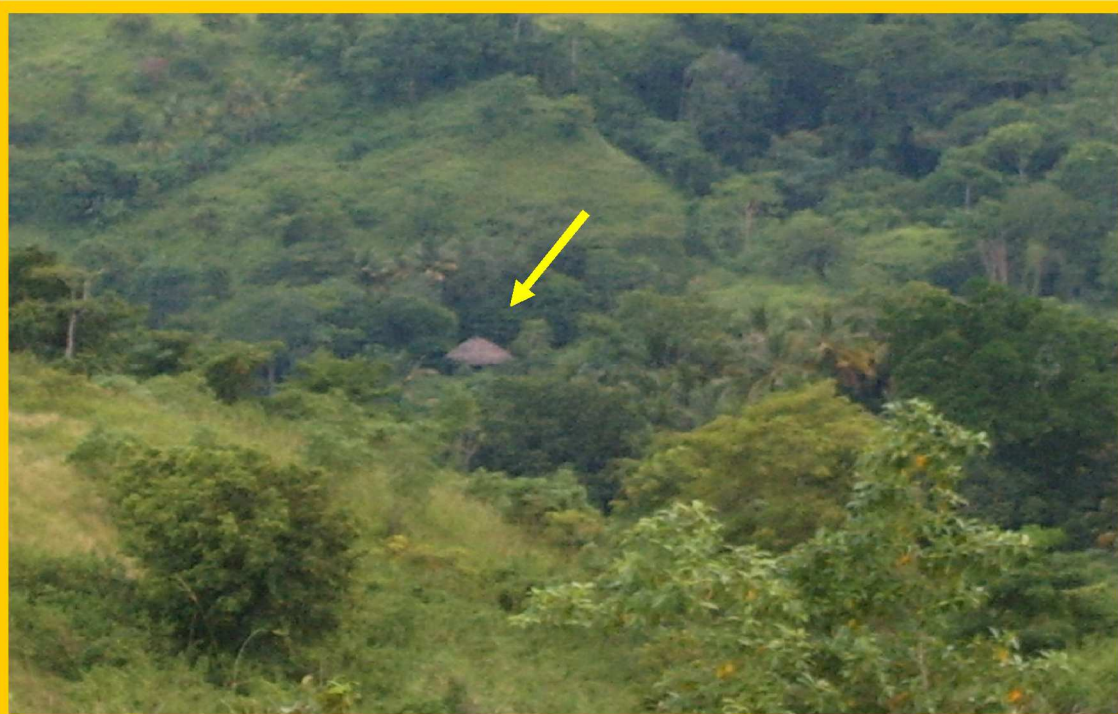
BPS Kabupaten Ciamis membuat Posko/Base Camp di Pangandaran Ciamis sebagai tempat pertemuan tim-tim kegiatan SPDKP tahun 2007. Base camp sebagai tempat berkoordinasi dan berdiskusi sekaligus sebagai tempat menginap petugas yang berdomisili jauh dari kecamatan terpilih SPDKP tahun 2007 (5 kecamatan terpilih berjarak sekitar 100 km dari BPS Kabupaten Ciamis)

Ditemukan banyak manfaat disediakannya Posko/Base Camp, antara lain yaitu:

- Efektivitas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
- Efisiensi waktu dan biaya perjalanan menuju lokasi;
- Pendataan dapat diselesaikan tepat waktu;
- Koordinasi dengan BPS kabupaten dan tim taskforce lebih mudah.

Sistem penyediaan Base Camp juga dilakukan oleh BPS Kabupaten Manggarai dan BPS Kabupaten Pesisir Selatan. Ada Base Camp yang sekaligus sebagai pusat pengolahan awal.





Satu RTSM yang ada di Lokasi sulit yang harus ditempuh dengan berjalan kaki di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur



Salah satu lokasi wilayah terpilih SPDKP Tahun 2007 Putaran 2 di Desa Pinggiran Darat , Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan adalah lokasi sulit sehingga harus ditempuh dengan perjuangan oleh para petugas tim Task Force gabungan dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala





Contoh beberapa rumah tangga di Desa Mane Kecamatan Mane Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bukan RTSM meskipun bangunan fisiknya tergolong miskin karena memiliki asset kekayaan





Di Kota Manado ditemukan RTSM LS/SW yang tidak layak PKH setelah diadakan verifikasi di lapangan dengan alasan memiliki warung di samping rumah



Ditemukan RTSM hasil temuan/tambahan pada SW+ yang Layak PKH, dengan melihat kondisi bangunan yang hampir rubuh. Kondisi ini ditemukan di Kota Manado





Gambar bangunan suatu rumah tangga yang memaksa petugas SPDKP di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara yang minta di cacah



RTSM yang mendapatkan bantuan rumah dari GTZ di Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam. Akibat bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 banyak RTSM yang mendapatkan bantuan rumah. Bantuan tersebut antara lain dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), GTZ, JICA, FOAM, dan lain-lainnya

## Pengawasan

Pengawasan/Verifikasi lapangan dilakukan dengan maksud untuk menjaga kualitas cakupan pendataan. Verifikasi hasil pendataan dimaksudkan untuk memastikan kebenaran karakteristik RTSM seperti:

- Nama dan alamat
- Daftar nama ART yang memenuhi persyaratan PKH (ibu hamil, balita, usia sekolah),
- Fasilitas pelayanan seperti nama dan alamat serta nama pengguna fasilitas tersebut yang sesuai (konsisten) dan benar.

Verifikasi dilakukan di semua desa/kelurahan. Petugas verifikasi adalah Tim Task Force dari BPS provinsi dan BPS kabupaten/kota yang pengaturannya dikoordinasikan oleh BPS Provinsi

Verifikasi hasil pencacahan SPDKP07 dilakukan pada RTSM dan Fasilitas Pelayanan Dasar. Verifikasi terhadap RTSM tidak dilakukan di seluruh SLS, tetapi pada sekitar 25 persen SLS. SLS dipilih secara *linear systematic* dengan interval banyaknya SLS di desa dibagi 4. Semua RTSM pada SLS terpilih baik yang berasal dari Daftar SPDKP07.LS maupun dari Daftar SPDKP07.SW harus diverifikasi. Verifikasi fasilitas pelayanan dasar difokuskan pada semua Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Tsanawiyah serta Puskesmas di setiap desa





Andi Suwandy Kepala Bidang Neraca BPS Provinsi DI Yogyakarta bersama M. Sairi Hasbullah petugas Task Force BPS , sedang melakukan verifikasi RTSM di Kabupaten Bantul



Agus Marzuki, petugas Task Force dari BPS sedang melakukan verifikasi kerumaht angga di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur





Tim task force dari BPS dan BPS Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat sedang melakukan tugas untuk mengecek kebenaran data. Dalam melakukan verifikasi, desa yang dikunjungi oleh tim verifikasi BPS dan BPS provinsi tidak sama dengan yang dikunjungi oleh BPS kabupaten/kota



Tim task force dari BPS Pusat dan BPS Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta sedang melakukan tugas untuk mengecek kebenaran data. Temuan-temuan hasil verifikasi disampaikan kepada petugas, BPS kabupaten dan dibuat laporan yang disampaikan pada Sekretariat SPDKP



Tim BPS sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) yang diperbantukan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan dalam rapat koordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kabupaten Nias dan Nias Selatan

Secara umum, Korlap bertugas membantu pelaksanaan kegiatan SPDKP tahun 2007 di 4 Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 2 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Korlap juga bertugas dalam hal meyakinkan manajemen operasional SPDKP di lapangan dapat berjalan lancar sesuai prosedur dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Antara lain dengan cara memberi motivasi kepada petugas lapangan sehingga pencacahan dapat berlangsung efektif dan efisien serta penuh tanggung jawab.





Tampak dalam gambar Petugas Korlap dari BPS sedang melakukan pertemuan dengan aparat di BPS Kabupaten Nias



Petugas Korlap dari BPS sedang melakukan diskusi dengan tim pencacahan SPDKP 2007 di Kecamatan Sironbu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini dibahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SPDKP 2007 dan solusinya



# BAB 5



# PENGOLAHAN DATA 5

## Sistem Ban Berjalan

Mekanisme pengolahan data SPDK menggunakan sistem **"Ban Berjalan"**. Yang dimaksud dengan sistem ban berjalan adalah melaksanakan tiga kegiatan pokok pendataan (survei) secara berantai dan berkesinambungan. Tiga kegiatan pokok tersebut adalah pengumpulan data di lapangan, pengolahan data di pusat pengolahan, dan verifikasi data hasil pengolahan ke lapangan. Dalam mekanisme ban berjalan, setelah selesai pencacahan lapangan untuk satu wilayah pencacahan (blok sensus) segera dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dikirim ke pusat pengolahan data tanpa harus menunggu pendataan dalam satu desa/kecamatan selesai (lengkap). Dengan sistem ban berjalan maka tiga kegiatan pokok tersebut di atas sebagian besar akan dilaksanakan secara parallel.

Secara garis besar tahapan pengolahan data dokumen SPDK terdiri dari:

- Penerimaan dokumen
- *Batching*
- Editing
- Pra komputer
- Data entri dan validasi
- Pengiriman file



Petugas Pusat Pengolahan di BPS Kabupaten Nias sedang menerima dokumen hasil pencacahan lapangan (gambar kiri); kumpulan dokumen yang siap di *batching* (gambar kanan)

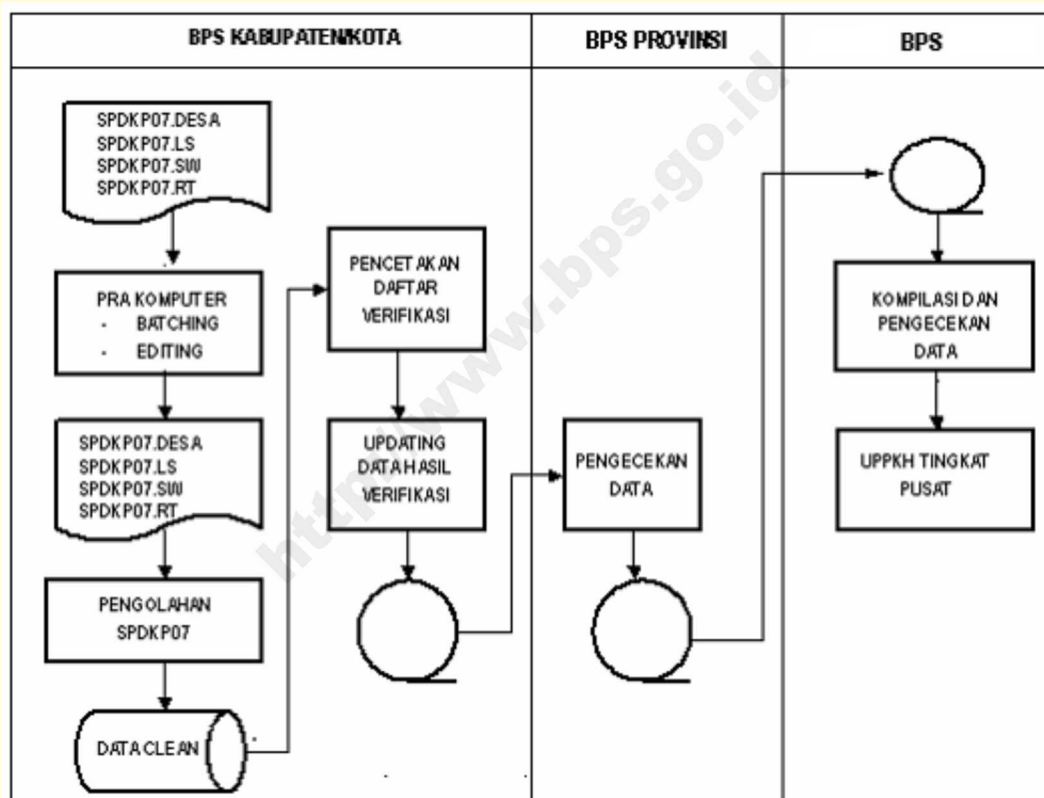
Pusat Pengolahan dalam kegiatan SPDKP dapat dibedakan menjadi:

- Pusat pengolahan awal
- Pusat pengolahan pengumpul
- Pusat pengolahan akhir

Pusat pengolahan awal berlokasi di masing masing BPS kabupaten/kota, pusat pengolahan pengumpul berlokasi di BPS provinsi, dan pusat pengolahan akhir adalah Direktorat Sistem Informasi Statistik (Dit SIS) di BPS. Diagram alir pengolahan SPDKP dapat dilihat pada gambar di bawah ini

**Gambar 5.1.**

**Diagram Alir Pengolahan SPDKP berdasarkan Tugas Pusat Pengolahan**



Tahapan pengolahan data SPDKP adalah:

- Tahapan Pra Komputer: merupakan penanganan dan pengorganisasian dokumen sebelum pelaksanaan perekaman data.
- Tahapan Komputer: terdiri dari kegiatan perekaman data dan kegiatan kompilasi data.
- Tahapan Pasca Komputer: merupakan kegiatan lanjut dalam rangka menghasilkan database yang akurat dan berkualitas.





Tahapan Pra Komputer: beberapa petugas SPDKP di Kecamatan Geumpang, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam bersama seorang Koordinator Lapangan (Korlap) sedang memeriksa dokumen SPDKP Tahun 2007 Putaran-2. Kegiatan pemeriksaan dokumen merupakan salah satu bagian kegiatan Pra Komputer



Tahapan Pra Komputer: petugas editing di Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan kegiatan *editing coding* yang merupakan salah satu bagian kegiatan Pra Komputer

Proses perekaman data SPDKP dengan komputer terdiri dari:

1. Perekaman data fasilitas desa
2. Perekaman data hasil verifikasi awal dan data hasil penyisiran
3. Perekaman data rumah tangga
4. Pengecekan data error
5. Pengambilan sampel Satuan Lingkungan Setempat (SLS) untuk verifikasi akhir
6. Pencetakan daftar untuk verifikasi akhir
7. Up dating data hasil verifikasi akhir

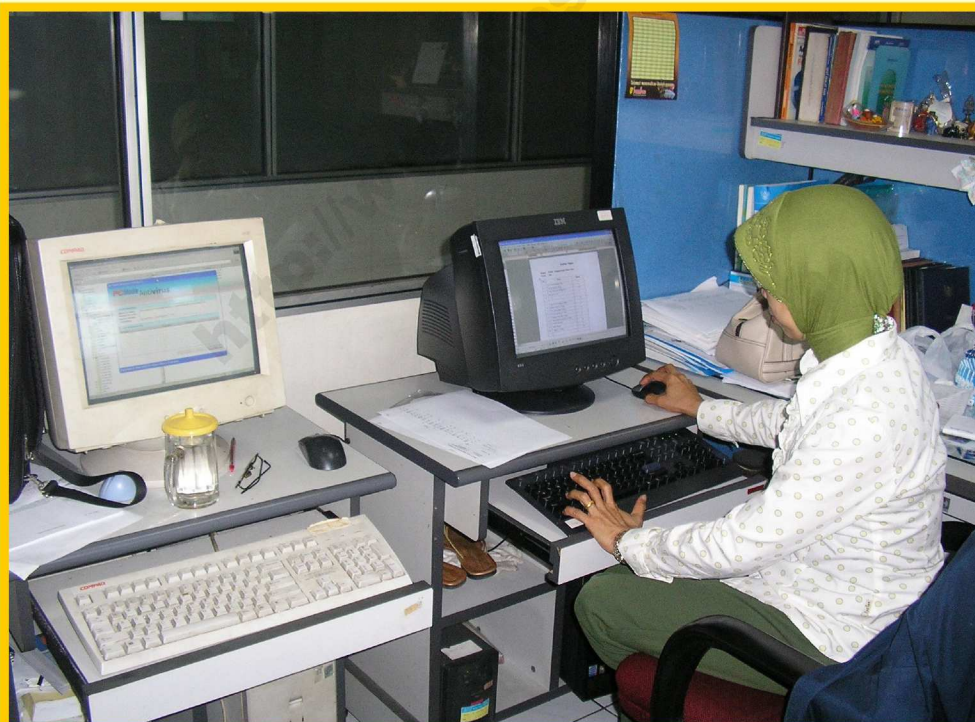
Validasi merupakan proses perekaman dan pengecekan validitas data dengan menggunakan aplikasi program SPDKP. Pemeriksaan validitas data antara lain meliputi kelengkapan dokumen, kebenaran batas nilai (*range check*) dan konsistensi antar variabel.



Perekaman Data: beberapa petugas data entri dan validasi di BPS Kabupaten Nias, Sumatera Utara sedang melakukan proses data entri dan validasi



## Verifikasi Hasil Pengolahan

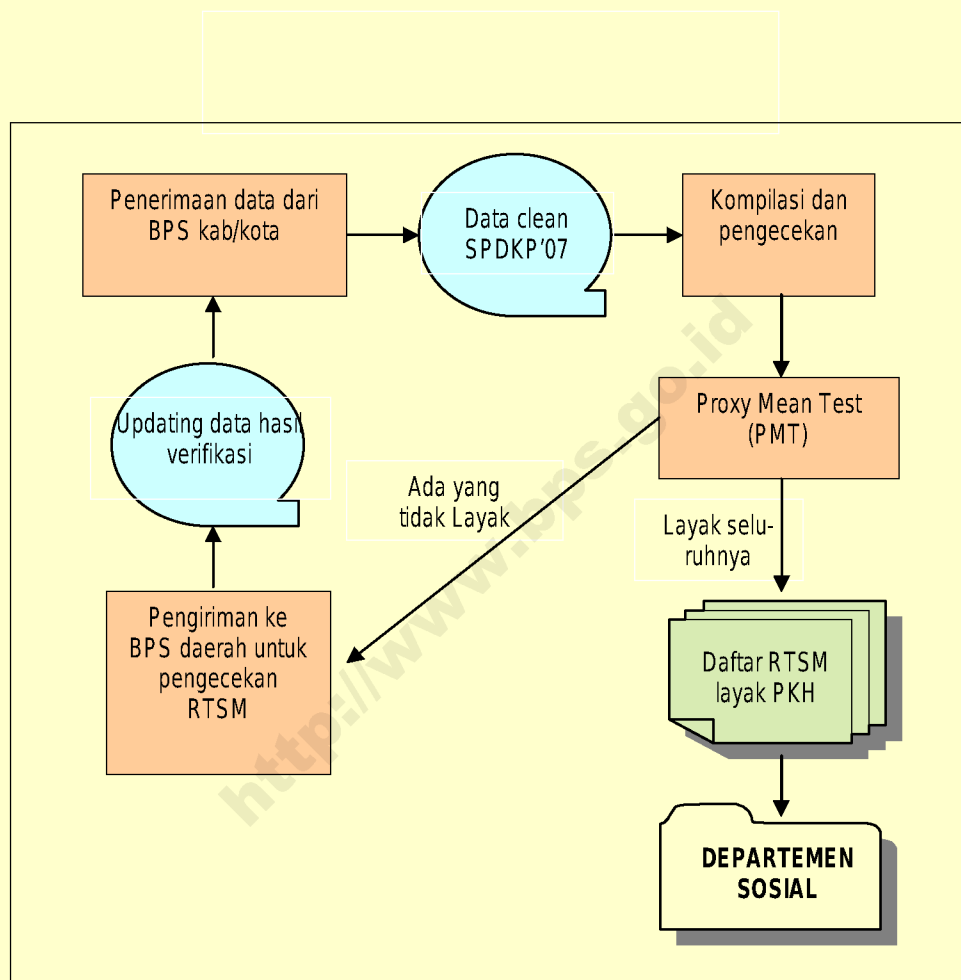


Verifikasi data hasil perekaman: pengecekan data hasil perekaman data dilakukan segera setelah perekaman data selesai dilakukan. Bila ditemukan kesalahan maka dilakukan pengecekan kembali ke dokumen pencacahan. Tampak seorang penanggung jawab pengolahan BPS Kabupaten Nias, Sumatera Utara sedang melakukan pengecekan data (gambar atas) dan seorang penanggung jawab pengolahan di Subdit Pengembangan Basis Data sedang mengecek data kiriman dari daerah (gambar bawah)

## Kompilasi Data

Pengiriman hasil pengolahan SPDKP ke BPS dilakukan dengan menggunakan media pengiriman yang tercepat (e-mail, pos patas, dan kurir). Untuk pengolahan yang dilakukan di BPS kabupaten/kota pengiriman ke BPS melalui BPS provinsi. Dalam proses kompilasi BPS kabupaten/kota mengirim file data *clean* ke BPS provinsi. BPS provinsi melakukan kompilasi, memeriksa kelengkapan data dan mengirimkannya ke BPS Pusat, termasuk membuat catatan mengenai data yang sudah dikirimkan ke BPS Pusat.

**Gambar 5.2. Diagram Alir Pengolahan SPDKP berdasarkan Tugas Pusat Pengolahan**



Kendala yang umumnya dihadapi beberapa pusat pengolahan data, antara lain adalah:

- Pemadaman listrik, hal ini terjadi secara rutin di banyak daerah seperti di Kabupaten Manggarai Barat, Kota Medan dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Untuk mengatasi permasalahan ini, umumnya pusat pengolahan data melakukan pengadaan genset dengan cara menyewa.
- Jumlah komputer yang dapat digunakan untuk mengolah terbatas. Dalam hal ini setiap pusat pengolahan mempunyai strategi masing-masing yang mereka anggap efisien untuk kondisi mereka, seperti: menambah komputer dengan cara menyewa dan membagi waktu pengolahan menjadi beberapa shift dalam sehari.
- Pengiriman dokumen dari lapangan ke pusat pengolahan, tidak lancar. Strategi yang umumnya dilakukan adalah melakukan sistem 'jemput bola' oleh petugas pengolah data.





Staf Sub Direktorat Pengembangan Basis Data BPS sedang melakukan pengecekan error data SPDKP hasil kompilasi data dari BPS daerah



Administrator database di Sub Direktorat Pengembangan Basis Data sedang memantau *performance* database SPDKP



Server berkapasitas besar yang dimiliki Sub Direktorat Pengembangan Basis Data BPS, tempat database SPDKP disimpan


Spesifikasi komputer yang digunakan dalam pengolahan data SPDKP adalah:

- *Server*, untuk melakukan instalasi Database Server sekaligus sebagai penyimpanan data pada pengolahan SPDKP.
- *Client*, untuk melakukan instalasi *Client* program pengolahan SPDKP.
- *Stand Alone*, untuk melakukan instalasi *Client* dan *Server* dalam satu computer yang sama dan untuk mengolah data SPDKP dengan tidak menggunakan fasilitas jaringan.





Tampak CD yang dikirim dari Pusat Pengolahan ke Sub Direktorat Pengembangan Basis Data, BPS Pusat. Data dari CD-CD kiriman ini akan dikompilasi sehingga didapat data SPDKP yang lengkap untuk seluruh wilayah terpilih SPDKP. Selain itu pengiriman data dari Pusat Pengolahan juga dilakukan melalui email



# BAB 6





Wynandin Imawan, Koordinator Tim Teknis Materi SPDKP didampingi oleh M. Sairi Hasbullah Ketua Tim Teknis Evaluasi Data SPDKP, tampak dalam gambar sedang memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pembinaan Pelaksana SPDKP 2007 di Bali



Rapat Pembinaan Pelaksana SPDKP 2007 di Bali dihadiri oleh peserta BPS Pusat : Pimpinan BPS dan Pejabat terkait, baik sebagai pembicara, peserta maupun panitia; Peserta BPS Provinsi adalah seluruh kepala Subbagian Keuangan, seluruh Kepala Seksi Statistik HK/HPB, Kepala Seksi Statistik Ketahanan Sosial dan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan Data dari 15 BPS Provinsi. Peserta BPS kabupaten/kota (97 kabupaten/kota pelaksana SPDKP Tahap I Putaran-2) adalah seluruh Kepala Subbagian Tata Usaha, seluruh Kepala Seksi Statistik Sosial, dan seluruh Kepala Seksi IPDS



Kepala BPS Dr. Rusman Heriawan yang didampingi para eselon 1 memberikan pengarahan pada acara penutupan Pembinaan Pelaksana SPDKP 2007 yang diintegrasikan dengan kegiatan Workshop Indeks HPB. Peserta terdiri dari para eselon 4 dari 15 provinsi dan 97 kabupaten/kota terpilih SPDKP 2007 Tahap I Putaran-2

Pembinaan Pelaksana SPDKP tahun 2007 ini diharapkan dapat mencapai hasil sebagai berikut:

1. Peserta pembinaan memahami standar operasional prosedur pengaduan Unit Pengaduan Program Keluarga Harapan (UPPKH) sehubungan dengan hasil pendataan SPDKP ;
2. Memahami hubungan antar pelaksana teknis dan administrasi dalam kegiatan SPDKP dan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan statistik lainnya
3. Peserta pembinaan memahami tata laksana administrasi dan anggaran yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BPS terutama dengan adanya peraturan-peraturan baru dalam pengelolaan anggaran.



## Rapat Evaluasi Kegiatan SPDKP

Pelaksanaan kegiatan SPDKP07 secara teknis telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal. Oleh karena itu, Pimpinan BPS memandang perlu menyelenggarakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan SPDKP melalui Rapat Evaluasi Kegiatan SPDKP yang dilaksanakan di Batam pada tanggal 4-7 Desember 2007



Kepala BPS Dr. Rusman Heriawan didampingi oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Arizal Ahnaf pada acara Pembukaan Rapat Evaluasi Kegiatan SPDKP 2007 yang dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi serta kabupaten/kota terpilih SPDKP 2007. Dalam Rapat Evaluasi Kegiatan SPDKP akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan SPDKP07 baik dari segi teknis maupun administrasi. Rapat evaluasi ini dilakukan secara rinci dan paripurna. Dalam rapat ini sekaligus dilaksanakan evaluasi kegiatan statistik di bidang sosial untuk yang sudah dilaksanakan di tahun 2007 dan penjelasan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2008

Tujuan dari rapat evaluasi antara lain:

- Agar dapat diketahui kondisi akhir dari pelaksanaan SPDKP di seluruh wilayah uji coba
- Sebagai pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan kegiatan SPDKP07 secara keseluruhan
- Penjelasan mengenai SOP penanganan pengaduan rumahtangga ke UPPKH
- Penjelasan mengenai kegiatan dan pembiayaan anggaran 2008.



Peserta Rapat Evaluasi SPDKP mendengarkan dengan seksama sambutan kepala BPS pada acara pembukaan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau





Arizal Ahnaf, Deputy Bidang Statistik Sosial memimpin Rapat Evaluasi SPDKP sekaligus bertindak sebagai moderator dari para koordinator teknis dan administrasi SPDKP yang menjelaskan perihal teknis pendataan, pengolahan data, alokasi anggaran, dan pelaporan keuangan



Aminul Akbar, Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau selaku Ketua Bidang Penyelenggaraan Rapat Evaluasi SPDKP sedang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Evaluasi



Sesi Pembelajaran SPDKP Putaran 2 dengan moderator M. Sairi Hasbullah Ketua Tim Teknis Evaluasi data SPDKP, dengan materi pembelajaran:

1. Mekanisme Pendataan SPDKP07 di BPS Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat oleh Bas-koro Kepala BPS Kabupaten Ciamis
2. Mekanisme Pendataan SPDKP07 di BPS Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara oleh Dinar Butar-Butar Kepala BPS Tapanuli Tengah
3. Mekanisme Pendanaan SPDKP07 di BPS Provinsi Jawa Tengah oleh Carsadi Bin Casmito Kepala Bagian Tata Usaha Provinsi Jawa Tengah



Kerangka Acuan  
Sesi Pembelajaran dari Daerah  
Penyelenggaraan Evaluasi Survei Pelayanan Dasar  
Kesehatan dan Pendidikan Tahun 2007

Sesi Pembelajaran SPDKP Tahun 2007 dimaksudkan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memperoleh data SPDKP Tahun 2007 yang bebas kesalahan (*zero error*). Adapun tujuan utama dari Sesi Pembelajaran SPDKP Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme koordinasi lapangan (di tingkat provinsi dan kabupaten) dalam mengoptimalkan tugas seluruh jajaran yang terlibat dalam penanganan SPDKP, baik dalam aspek keuangan, teknis pendataan, pengawasan lapangan, pengolahan, dan verifikasi hasil pengolahan.
2. Untuk mengetahui strategi pendataan lapangan yang efektif dan efisien, khususnya menyangkut mekanisme pendataan, mekanisme pengawasan lapangan baik oleh PML maupun tim task force, pengolahan, dan pemeriksaan hasil pengolahan.
3. Untuk mengetahui strategi pengolahan data yang dilakukan dan evaluasi kemungkinan penerapan sistem ban berjalan untuk pendataan-pendataan survei/sensus di masa yang akan datang.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya yang dilakukan dalam pendanaan, khususnya pembayaran honor petugas dan pembuatan SPJ, dan pembuatan laboran daya serap.

## EVALUASI 6

Setelah kegiatan SPDKP selesai dilaksanakan, BPS menyelenggarakan rapat evaluasi secara nasional sebanyak 2 kali. Rapat pertama berupa Pembinaan Pelaksana SPDKP di Bali yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan workshop Indeks HPB dan rapat kedua mengenai Evaluasi Kegiatan SPDKP di Batam.

### Rapat Pembinaan Pelaksana SPDKP

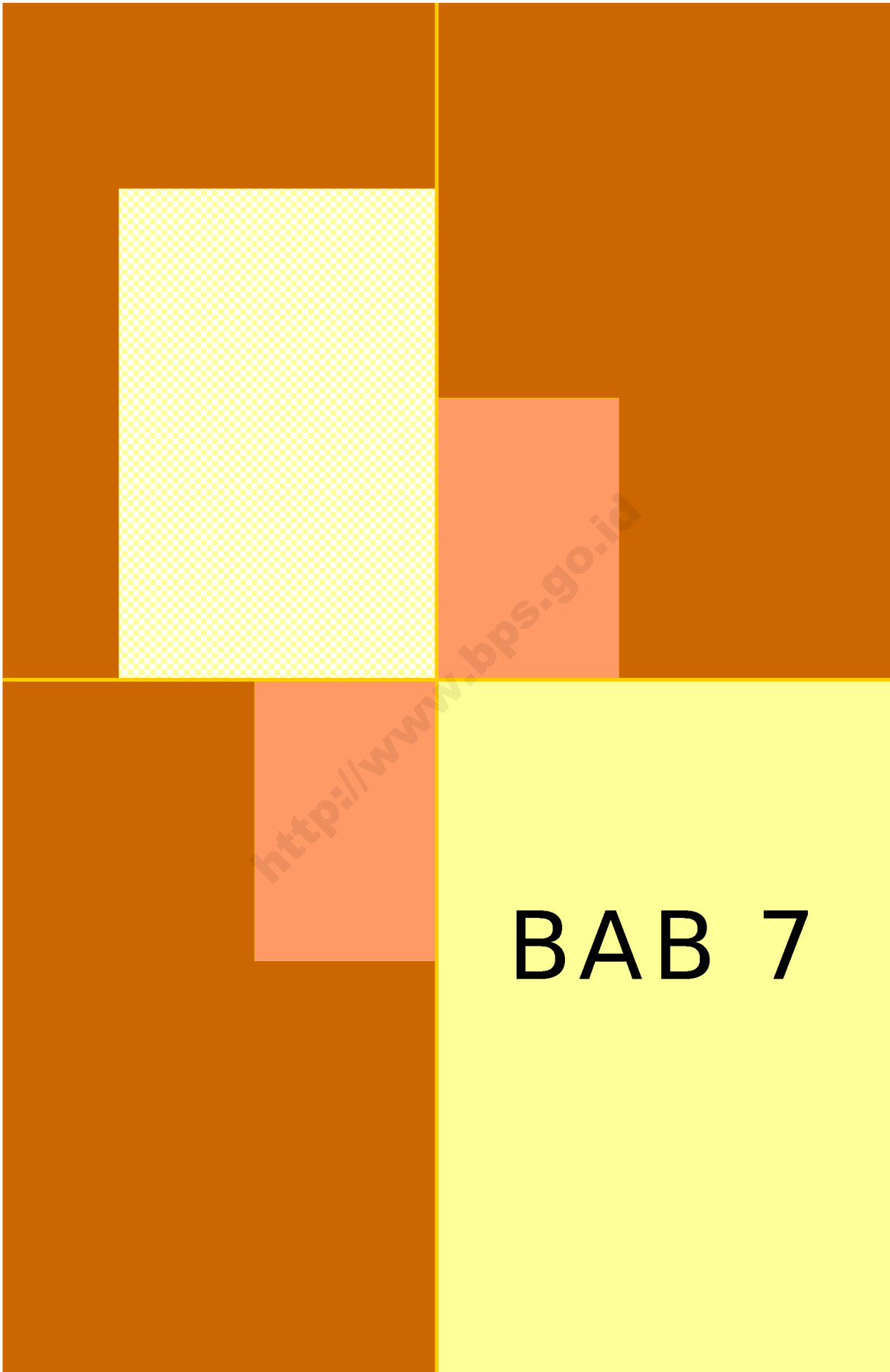

Tujuan Pembinaan Pelaksana SPDKP tahun 2007 adalah :

- (1) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan SPDKP Tahun 2007 baik untuk pendataan, pengolahan dan administrasi keuangan;
- (2) Pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan kegiatan SPDKP Tahun 2007 secara keseluruhan;
- (3) Penjelasan mengenai *Standard Operational Procedure* (SOP) penanganan pengaduan rumah tangga ke UPPKH;



Pietojo Deputi Bidang Statistik Ekonomi didampingi oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Arizal Ahnaf dan Kepala BPS Provinsi Bali Ida Komang Wisnu selaku Ketua Umum Bidang Penyelenggaraan, berkenan membuka acara Pembinaan Pelaksana SPDKP 2007 di Bali yang diselenggarakan tanggal 24-28 Nopember 2007





# BAB 7

## PENUTUP 7

Kegiatan SPDKP merupakan kegiatan pendataan yang diselenggarakan secara ekstra hati-hati, karena data yang dihasilkan akan disajikan pada tingkat individu rumah tangga menurut nama dan alamat. Kesalahan dalam penentuan RTSM dapat berdampak luas, yaitu tidak saja merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan, namun juga pada institusi BPS sendiri yaitu dapat mengurangi kepercayaan masyarakat akan data yang dihasilkan BPS.

Data rumah tangga hasil SPDKP adalah data RTSM layak PKH, yaitu RTSM yang memiliki anak balita (bayi dibawah lima tahun), dan/atau anak usia sekolah SD/SLTP (5-17 tahun), dan/atau wanita usia subur (WUS) yang sedang hamil.

Data RTSM layak PKH dituntut bebas dari kesalahan (*zero error*), baik kesalahan cakupan maupun kesalahan isian. Kesalahan cakupan artinya kesalahan karena memasukkan rumahtangga yang bukan RTSM layak PKH dan kesalahan karena tidak memasukan RTSM layak PKH. Sedangkan kesalahan isian artinya kesalahan karena ketidaktepatan karakteristik tertentu dari data RTSM layak PKH, seperti kesalahan penulisan nama anak, nama sekolah dan nama fasilitas kesehatan biasanya dikunjungi RTSM layak PKH.

Untuk menghindari setiap jenis kesalahan, diperlukan upaya pelaksanaan pendataan secara optimal dan konsisten. Upaya ini ditempuh dengan mengembangkan mekanisme pendataan dan pengawasan yang efektif. Secara khusus, pendataan lapangan dilakukan secara tim dan pengawasan dilakukan dengan mengaktifkan task force pada semua jajaran.

Laporan pelaksanaan SPDKP dalam gambar ini menjelaskan semua proses pelaksanaan kegiatan SPDKP, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi data, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan. Pengalaman berharga selama pelaksanaan SPDKP tahun 2007 digambarkan dalam laporan ini sehingga berguna bagi pelaksana SPDKP berikutnya dan pendataan mikro sejenis di masa yang akan datang.



## Lampiran 1: Daftar SPDKP07.LS - Putaran 2



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

SPDKP07.LS

### SURVEI PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN 2007

RAHASIA

I. PENGENALAN TEMPAT					II. KETERANGAN PETUGAS					
1. Propinsi	DKI JAKARTA	31	1. Tanggal Pencacahan							
2. Kabupaten/Kota *)	JAKARTA UTARA	75		Nama		Tanda Tangan				
3. Kecamatan	KOJA	040	2. Petugas I							
4. Desa/Kelurahan/Nagari *)	RAWABADAK SELATAN	001	3. Petugas II							
5. Nama SLS lengkap dibawah Desa/Kelurahan/Nagari *)	TANAH MERAH BLOK B		4. Koordinator Tim							
6. Jumlah RT yang layak didata lebih lanjut dengan SPDKP07.RT										
III. VERIFIKASI RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN										
No Urut	Nomor KIP	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Rumah tangga ini bagian dari rumah tangga lain penerima BLT ? 1. Ya -> Stop 2. Tidak	Kemampuan ekonomi rumah tangga ini ? 1. Mampu -> Stop 2. Tidak/Kurang mampu	Rumah tangga ini layak disebut RTSM ? 1. Ya 2. Tidak -> Stop	Ada ART usia 0 - 17 tahun ? 1. Ya 2. Tidak	Ada WUS (10 - 49 tahun) ? 1. Ya 2. Tidak	Bila ada WUS, apakah sedang hamil ? 1. Ya 2. Tidak	Perlu pendataan lebih lanjut dengan SPDKP07.RT ? 1. Ya 2. Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	317504000101022	SAADI H	TANAH MERAH BLOK B							
2	317504000101023	SA'AMAN	TANAH MERAH BLOK B							
3	317504000101024	SUMASTI	TANAH MERAH BLOK B							
4	317504000101026	PATMO	TANAH MERAH BLOK B							
5	317504000101028	SAKRA	TANAH MERAH BLOK B							
6	317504000101029	SAMSURI	TANAH MERAH BLOK B							
7	317504000101046	SOLIKIN	TANAH MERAH BLOK B							
8	317504000101048	WAHONO	TANAH MERAH BLOK B							
9	317504000101021	NIMAN	TANAH MERAH BLOK B							
10	317504000101033	DAMIN	TANAH MERAH BLOK B							
11	317504000101036	DIDI SUDARMANTO	TANAH MERAH BLOK B							
12	317504000101051	SANUSI	TANAH MERAH BLOK B							

\* Coret yang tidak sesuai

Hal 1 / 1